

**UPAYA PEMERINTAH DALAM MENANGGULANGI
COVID-19 DI KELURAHAN TAMAMAUNG KECAMATAN
PANAKKUKANG KOTA MAKASSAR**



SKRIPSI

Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan
Program Sarjana (S1) Pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Oleh:

SESILIA CLAUDYA G. KELEN

4517021059

ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLTIK

UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR

2021

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

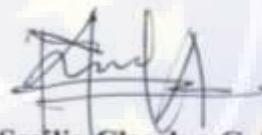
Nama : Sesilia Claudya G. Kelen
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bosowa
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul Skripsi : UPAYA PEMERINTAH DALAM MENANGGULANGI COVID-19 DI KELURAHAN TAMAMAUNG KECAMATAN PANAKKUKANG KOTA MAKASSAR

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya sendiri bukan dari orang lain, baik sebagian ataupun seluruhnya. Pendapat ahli, dan rujukan lain (Penelitian sebelumnya, dan Jurnal terdahulu) ini dikutip atau dirujuk berdasarkan Kode Etik Ilmiah.

Apabila karya ilmiah atau penulisan skripsi ini terbukti merupakan duplikat ataupun plagiasi dari hasil karya penulisan lain atau dengan sengaja mengajukan karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar dan sanksi hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebagai pertanggungjawaban ilmiah tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun juga

Makassar, 24 Agustus 2021
Penulis,



Sesilia Claudya G. Kelen
4517021059

HALAMAN PENGESAHAN

UPAYA PEMERINTAH DALAM MENANGGULANGI COVID-19 DI
KELEKHAHAN TAMAMAUNG KECAMATAN PANAKKUKANG KOTA
MAKASSAR

Sesilia Claudya G. Kelen
4517021059

Makassar, 24 Agustus 2021

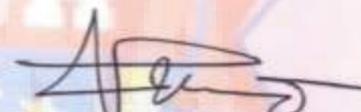
Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Drs Syamsuddin Maldun, M.Pd.
NIDN : 0904046601

Pembimbing II



Dr.Dra Nurkaidah, M.M.
NIDN : 0915098603

Mengetahui

Dekan FISIP
Universitas Bosowa Makassar



S.IP., M.A.
NIDN. 09117602

Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Negara



Nurmu Hasinda Zainal, S.Sos., M.Si
NIDN. 09150986

HALAMAN PENERIMAAN

Pada Hari Selasa, Tanggal Dua Puluh Empat Agustus Dua Ribu Dua Puluh Satu,
Dengan Judul Skripsi **UPAYA PEMERINTAH DALAM
MENANGGULANGI COVID-19 DI KELURAHAN TAMAMAUNG
KECAMATAN PANAKKUKANG KOTA MAKASSAR**

Nama : Sesilia Claudya G. Kelen
No. Stambuk : 4517021059
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Telah diterima oleh panitia ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Bosowa Makassar untuk memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar sarjana (S1) pada program studi Ilmu Administrasi Negara.

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris


Arief Wicaksono, S. Ip., M. A.


Nining Haslinda Zainal, S.Sos., M. Si

Tim Penguji Skripsi

1. Dr. Drs. Syamsuddin Maldun, M. Pd.

()

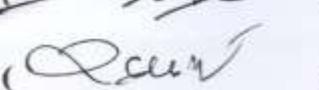
2. Dr. Dra. Nurkaidah, M.M.

()

3. Dr.Uddin B. Sore, SH., S.IP., M. Si.

()

4. Dr. Dra. Hj Juharni M.Si.

()

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan juga berkat-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan proposal dengan judul “Upaya Pemerintah Dalam Menanggulangi Covid-19 di Kelurahan Tamamaung Kota Makassar”, dapat terselesaikan tepat pada waktunya.

Adapun tujuan dari penulisan proposal ini merupakan syarat bagi penulis untuk penelitian dalam penyusunan skripsi pada program Ilmu Administrasi Negara dan untuk memperoleh gelar strata satu.

Dalam penyusunan proposal ini, penulis berupaya semaksimal mungkin agar dapat memenuhi harapan semua pihak, namun penulis menyadari tentunya masih banyak hambatan dan kekurangan yang terdapat dalam proposal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis. Dengan ini, penyusun penyampaian ucapan terima kasih yang tulus, istimewa kepada orang tua tercinta Bapak Leo Liung Kelen dan Ibu Katarina Diaz yang telah senantiasa memberi perhatian, membesarkan, mendidik dan mendoakan setiap langkah penulis serta memberi dukungan berbentuk moril ataupun materil yang tidak dapat terbalaskan. Begitu juga kepada kakak tercinta Maria Gracia Kelen serta seluruh keluarga besar atas perhatian dan pengorbanannya selama ini kepada penulis.

Proposal ini dapat terselesaikan tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Saleh Pallu, M. Eng Sebagai Rektor Universitas Bosowa Makassar
2. Arif Wicaksono, SIP, MA Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik
3. Nining Haslinda, S.Sos.,M.Si Ketua Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa.
4. Dr.Syamsuddin Maldun,M.Pd. Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, nasehat, dan petunjuk mengenai hal teknis dalam penulisan proposal ini.
5. Dr.Nurkaidah,MM Pembimbing II dalam penulisan proposal ini yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan petunjuknya mengenai hal teknis dalam penulisan proposal ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik khususnya dosen Program Studi Administrasi Negara, yang telah mendidik penulis selama perkuliahan.
7. Kepada Ayahanda Leo Liung Kelen serta Ibunda Katarina Diaz yang dengan penuh kesabaran dan penuh keikhlasan membesarkan, mendidik dan memberi dukungan moral dan materil serta doa yang tiada hentinya.
8. Kepada kakak Maria Gracia Kelen yang selalu memberikan semangat dan motivasi yang tiada henti-hentinya.
9. Kepada Nenek Gunu Welan dan Kakek Helu Kelen (Alm) yang selalu memberikan perhatian dan kasih sayang tiada hentinya.
10. Keluarga Besar Bapak Paulus Kemeba Kelen, Aloysus Ua Kelen, Tan Kelen yang selalu menjadi tempat suka dan duka, memberikan kasih sayang dan perhatian bagi penulis.

11. Kepala Keluarga Besar Bapak Yoseh Kelen dan Dominggus Diaz yang telah memberi tempat tinggal dan perlindungan selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Bosowa Makassar.
12. Saudara-saudari kelas ADM A, dan kelas ADM B yang selalu ada dalam suka dan duka selama penulis berkuliah di Universitas Bosowa.
13. Seluruh keluarga dan teman istimewa; Mama Margaretha Maran, Gratvila Dolo Molan, Maria Tupa Welan, dan group Isa Ama Fc yang selalu setia menjadi keluarga dan teman terbaik penulis.
14. Keluarga besar BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Keluarga Besar HIMAN (Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara) yang telah memberikan semangat, doa, serta menjadi wadah bagi penulis dalam berproses dan belajar.
15. Teman-teman Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Khususnya Angkatan Praksis 2017 yang telah memberikan motivasi kepada penulis sehingga proposal ini dapat selesai.
16. Sahabatku tercinta yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu selama 4 tahun, suka dan dukanya, motivasinya, bantuannya yang tidak akan terlupakan sampai kapanpun.
17. Teman tercinta Sutriani, Verni Stefiana, Chaterine Lusie Eramolik, Titin Musa yang menjadi tempat penulis mengeluh selama menyusun proposal dan yang selalu setia memberikan motivasi dan memberikan masukan bagi penulis.

18. Kakak Lelaki tercinta Tores Weking yang tetap setia membantu dan selalu memberikan jawaban ketika penulis banyak bertanya.

Serta kepada semua insan yang tercipta dan pernah bersentuhan dengan jalan hidup penulis.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa proposal ini masih jauh dari kata kesempurnaan, oleh karena itu peneliti mengharapkan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan proposal ini.

Makassar, 24 Agustus 2021

Penulis

SESILIA C. G. KELEN

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PENERIMAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
ABSTRAK	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Konsep Upaya	10
1. Pengertian Upaya.....	10
2. Jenis-jenis Upaya	11
B. Konsep Pemerintah.....	11
1. Pengertian Pemerintah.....	11
2. Fungsi Pemerintah	13
3. Tujuan Pemerintah.....	15
C. Pelaksanaan Kebijakan Publik	16
1. Pengertian Kebijakan Publik	16
2. Aspek-aspek yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan publik.....	19
3. Dimensi pelaksanaan kebijakan publik	22
4. Evaluasi pelaksanaan kebijakan publik	24

D. Respon Masyarakat	26
1. Respon	26
2. Masyarakat.....	27
E. Penelitian Terdahulu.....	29



F. Kerangka Konsep.....	31
BAB III : METODE PENELITIAN.....	34
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian.....	34
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	34
C. Sumber Data Penelitian	35
D. Deskripsi Fokus & Indikator Penelitian	36
E. Informan Penelitian	38
F. Desain Penelitian	39
G. Teknik Pengumpulan Data Penelitian	39
H. Teknik Pengabsahan Data Penelitian	43
I. Teknik Analisis Data	42
BAB IV : HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN.....	45
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	45
1. Visi & Misi Kelurahan.....	45
B. Identitas Informan.....	47
C. Hasil Penelitian.....	49
1. Pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam menanggulangi covid-19.	49
2. Respon Masyarakat dalam upaya menanggulangi covid-19.....	62
D. Pembahasan hasil penelitian.....	67
BAB V : PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	780
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN-LAMPIRAN	83

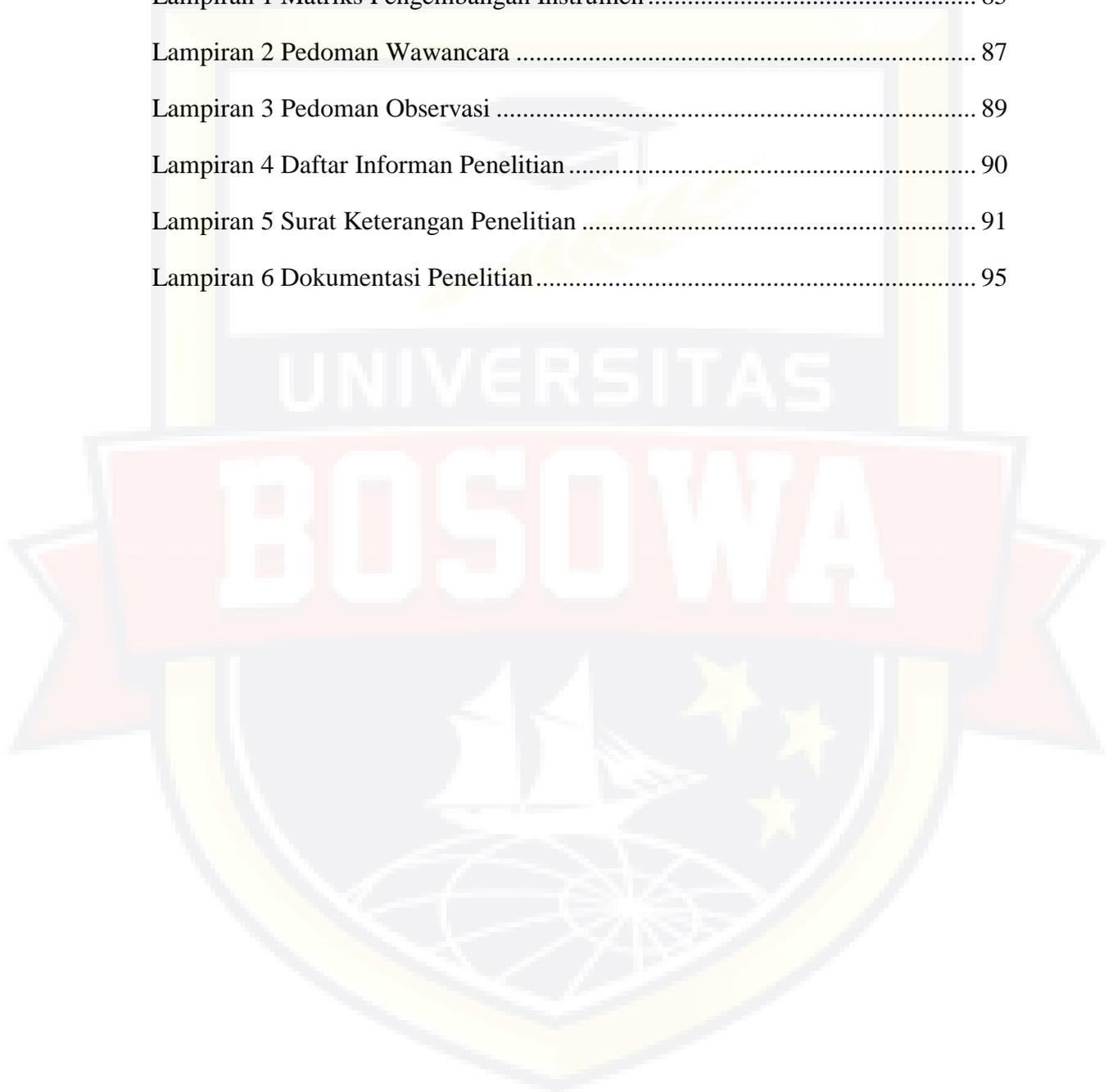
DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Konseptual.....	32
-----------------------------------	----



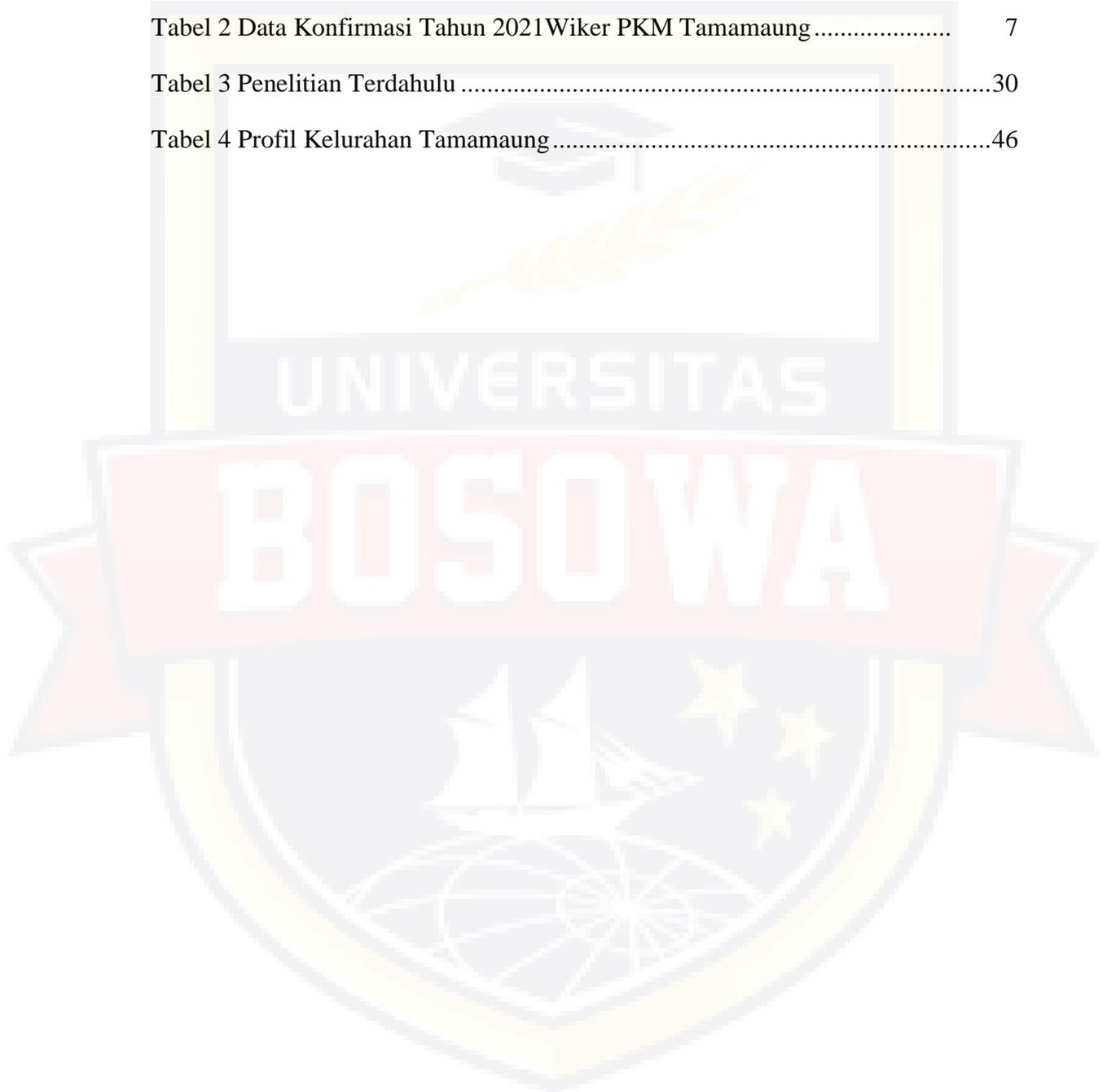
DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Foto Lokasi Penelitian	83
Lampiran 1 Matriks Pengembangan Instrumen	85
Lampiran 2 Pedoman Wawancara	87
Lampiran 3 Pedoman Observasi	89
Lampiran 4 Daftar Informan Penelitian	90
Lampiran 5 Surat Keterangan Penelitian	91
Lampiran 6 Dokumentasi Penelitian.....	95



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Konfirmasi Tahun 2020 Wiker PKM Tamamaung.....	7
Tabel 2 Data Konfirmasi Tahun 2021Wiker PKM Tamamaung.....	7
Tabel 3 Penelitian Terdahulu	30
Tabel 4 Profil Kelurahan Tamamaung.....	46



DAFTAR SINGKATAN

BLT : Bantuan Langsung Tunai

Bansos : Bantuan Sosial

PSBB : Pembatasan Sosial Berskala Besar

Covid : Corona Virus Disease

Dinkes : Dinas Kesehatan

FKTP : Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama

KBBI : kamus Besar Bahasa Indonesia

Kemenkes : Kementerian Kesehatan

ODP : Orang Dalam Pemantauan

OTG : Orang Tanpa Gejala

PDP : Orang Dalam Pengawasan

PDP : Pasien Dalam Pengawasan

Puskesmas : Pusat Kesehatan Masyarakat

SOP : Standar Operating Procedures

WHO : World Health Organization

ABSTRAK

Virus Corona atau *Corona Virus Disease* (Covid-19) Ditetapkan oleh organisasi kesehatan dunia atau *World Health Organization* (WHO) sebagai wabah pandemik global yang menyebabkan seluruh masyarakat menjadi takut dan resah. Laju penyebaran virus ini terbilang sangat cepat serta masif sehingga membuat pemerintah, baik dari pemerintah pusat hingga pada tingkat terendah seperti kelurahan harus benar-benar sigap melakukan berbagai upaya dalam pencegahan serta penanggulangan terhadap virus tersebut. Upaya yang dilakukan pemerintah yaitu mengeluarkan kebijakan terkait penanganan wabah covid-19. Peneliti merasa penting untuk mengkaji upaya yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi covid-19 di tingkat kelurahan serta terkait dengan respon dari masyarakat dalam menanggapi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deduktif yang mengkaji fenomena secara umum untuk menemukan hasil secara spesifik. Dalam penelitian kualitatif analisis data menggunakan cara induktif yakni dari umum ke khusus. Data dalam penelitian ini didapat dari hasil wawancara dan juga dokumentasi. Kesimpulan dari penelitian ini ialah pemerintah kelurahan tetap menjalankan kebijakan berdasarkan prosedur yang ada. Masih kurangnya sosialisasi yang belum berjalan dengan maksimal diperlihatkan dengan beberapa masyarakat yang masih belum memahami beberapa kebijakan yang ada. Terjadi perubahan sikap pada masyarakat terkait respon dalam bentuk kognitif, afektif, dan konatif atau tindakan sejak hadirnya wabah covid-19.

Kata Kunci : Covid-19, upaya, pelaksanaan kebijakan, respon masyarakat

ABSTRACT

Corona Virus or Corona Virus Disease (Covid-19) Defined by the World Health Organization (WHO) as a global pandemic that causes the whole community to be afraid and anxious. The rate of spread of this virus is quite fast and massive so that the government, both from the central government to the lowest level such as the sub-district must be really alert to make various efforts in the prevention and control of the virus. Efforts made by the government is to issue policies related to handling covid-19 outbreaks. Researchers feel it is important to examine the efforts made by the government in tackling covid-19 at the sub-district level and related to the response from the community in response to policies issued by the government. This study uses a qualitative approach by using deductive methods that examine the phenomenon in general to find results specifically. In qualitative research, data analysis uses inductive methods, namely from general to specific. Data in this study were obtained from interviews and documentation. The conclusion of this study is that the village government still runs the policy based on existing procedures. There is still a lack of socialization that has not worked to the maximum is shown with some people who still do not understand some of the existing policies. There have been changes in attitudes in society related to responses in the form of cognitive, affective, and conative or actions since the presence of the covid-19 outbreak

Keywords: *Covid-19, efforts, policy implementation, community response*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Awal tahun 2020 dunia dikejutkan dengan sebuah wabah yang dikenal dengan *Corona Virus Disease* atau virus corona (Covid-19) yang menyerang seluruh lapisan masyarakat di dunia. Organisasi Kesehatan Dunia atau *World Health Organization* (WHO) secara resmi menyatakan bahwa Covid-19 merupakan sebuah pandemik global dan meminta ke semua negara untuk melakukan upaya semaksimal mungkin guna membatasi penyebaran maupun jumlah kasus Covid-19. Covid-19 sangat berbeda dengan jenis penyakit epidemik lainnya seperti kolera, influenza, flu burung dan lain sebagainya. Covid-19 ini sangat menyiksa manusia karena jenis penularannya melalui percikan dahak atau kontak langsung dengan penderita, hingga menyebabkan kematian.

Adanya Covid-19 ini membawah pengaruh yang besar bagi kehidupan masyarakat, dimana segala kegiatan diluar rumah dibatasi, juga harus mengikuti himbauan dari pemerintah mengenai cara penanganan, dan kondisi kondisi ini pun hampir menghentikan aspek kehidupan sehari-hari, perdagangan dan aktivitas ekonomi lainnya, Bahkan negara harus mengucurkan dana untuk dapat menunjang kebutuhan hidup bagi rakyatnya yang dirumahkan atau untuk mengkonstruksi fasilitas medis baru. Menurut analisis *International Monetary Fund* (IMF), ekonomi global bakal susut setidaknya 3% tahun ini gara-gara pandemi. Sedangkan di Indonesia, Menteri Keuangan Sri Mulyani memprediksi ekonomi Indonesia minus 0,4% tahun ini. Sejak kasus pertama covid-19

diumumkan awal Maret 2020 lalu, data Kementerian Ketenagakerjaan mendapati bahwa sudah ada 1,5 juta orang yang kehilangan pekerjaan di Indonesia. Perkembangan penularan virus ini cukup signifikan karena penyebarannya sudah mendunia dan seluruh negara merasakan dampaknya. Dalam mengantisipasi serta mengurangi jumlah penderita virus corona di Indonesia sudah dilakukan seluruh daerah. Diantaranya pemerintah telah memberikan kebijakan membatasi aktifitas diluar rumah, segala jenis kegiatan sekolah dirumahkan, bekerja dari rumah, serta kegiatan ibadah pun dirumahkan.

Dalam mencegah penyebaran dan penularan virus corona menyebar luas dikalangan masyarakat, maka pemerintah membuat serangkain kebijakan dalam mengatasinya. Pada tanggal 31 Maret 2020 Bapak Presiden Jokowi mengadakan konferensi pers dengan tujuan untuk mengumumkan kepada publik mengenai kebijakan yang telah diambil, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang:

Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan *corona virus disease* (covid-19).

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang:

Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan covid-19 yang ditetapkan pada tanggal 3 April 2020.

Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar antara lain; 1) peliburan sekolah dan tempat kerja, 2) pembatasan kegiatan keagamaan, 3) pembatasan kegiatan ditempat/fasilitas umum, 4) pembatasan kegiatan sosial budaya, 5) pembatasan moda transportasi, 6) pembatasannya kegiatan lainnya terkait aspek

pertahanan dan keamanan. Juga keputusan menteri kesehatan Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 tentang:

Protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian corona virus disease (covid-19).

Pengertian dari Pembatasan Sosial Berskala Besar sendiri ialah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam wilayah yang diduga terinfeksi *corona virus disease* (covid-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran covid-19. Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diyakini merupakan salah satu cara terbaik dalam menekan laju penyebaran covid-19. Namun dilihat dari perkembangan penyebaran dan penularannya hingga pada tanggal 17 Juni 2020 total kasus positif corona di Indonesia mencapai 40.400 orang, pasien yang sembuh sebanyak 15.703 orang dan yang meninggal dunia sebanyak 2.231 orang (www.tribunjogja.id). Jumlah kasus orang yang terinfeksi terus mengalami peningkatan.

Dampak dari virus corona sendiri sangat besar, dan bersifat global. Hal ini tak hanya mempengaruhi tingkat kesehatan masyarakat secara umum, namun juga mempengaruhi aktivitas ekonomi, sosial, psikologi, budaya, politik, pemerintahan, pendidikan, olahraga, agama dan lain sebagainya. Karena itu dibutuhkan kebijakan dari pemerintah yang tepat agar bisa mencegah dan mengatasi wabah ini. Kebijakan yang diperlukan bukan hanya kebijakan untuk mencegah dan menyembuhkan pasien yang terjangkit virus corona, tetapi juga kebijakan untuk bisa mengatasi dampak sosial, dan juga ekonomi yang ditimbulkan oleh wabah virus corona ini.

Kebijakan (*policy*) merupakan suatu cara berfikir atau bertindak yang dipilih untuk mengarahkan suatu pengambilan keputusan. Kebijakan merupakan instrument pemerintah, bukan saja dalam arti *government* yang hanya menyangkut aparatur negara, tetapi juga *governance* yang menyentuh pengelolaan sumberdaya publik. Menurut Pendapat dari Thomas Dye (1992:2-4) dalam (Sahya, 2014) kebijakan publik yaitu:

“segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, alasan suatu kebijakan harus dilakukan dan manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan tidak menimbulkan kerugian, disinilah pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan”.

Pada intinya kebijakan merupakan keputusan-keputusan atau pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial, dan manusia demi kepentingan publik. Kebijakan publik adalah keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tatanan strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Kebijakan publik harus mampu mengakomodasikan berbagai kepentingan yang berbeda. Kebijakan publik pun harus mampu mengagregasikan berbagai kepentingan dalam suatu produk kebijakan yang bersifat prioritas, urgen, dan mengarah pada upaya untuk menata kepentingan yang lebih luas. Salah satu hal penting yang harus dilakukan setelah dikeluarkan kebijakan dari pemerintah, yaitu dibutuhkan pelaksanaan dari pemerintah serta respon dari masyarakat secara cepat dan cermat dalam menghalau wabah covid-19 ini.

Pelaksanaan kebijakan secara sederhana adalah pelaksanaan atau penerapan suatu kebijakan. Pelaksanaan kebijakan bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau mekanisme yang dibingkai pada suatu sistem tertentu. Pelaksanaan kebijakan merupakan suatu kegiatan terencana yang dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Makna dari pelaksanaan kebijakan publik merupakan suatu hubungan yang memungkinkan pencapaian tujuan-tujuan atau sasaran sebagai hasil akhir dari kegiatan yang dilakukan pemerintah. Kekurangan atau kesalahan kebijakan publik akan dapat diketahui setelah kebijakan tersebut dilaksanakan, keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik dapat dilihat dari dampak yang ditimbulkan sebagai hasil evaluasi pelaksanaan suatu kebijakan (Rohman,2016). Dengan adanya respon yang baik dari masyarakat tentunya kebijakan akan mampu berjalan dengan baik, respon masyarakat terhadap kebijakan penanggulangan covid-19 ini sangat beragam dari yang sangat mematuhi dan ada juga yang acuh tak acuh terhadap bahaya virus ini.

Menurut pendapat dari (Subandi, 2014) bahwa respon ialah:

“respon dengan istilah umpan balik yang memiliki peran atau pengaruh yang besar dalam menentukan baik atau tidaknya suatu komunikasi serta tindakan”.

Respon masyarakat dalam menanggapi covid-19 ini memang sangat bervariasi, ada yang sungguh-sungguh patuh dalam mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah, namun ada pula yang mengerti tetapi karena alasan ekonomi, maka terpaksa mereka bekerja diluar rumah demi bisa bertahan hidup, dan ada pula yang meremehkan virus ini dengan beranggapan hanya sebatas virus biasa

jadi tidak perlu ditakuti. Maka tak heran jika angka kasus positif covid-19 ini terus meningkat. Salah satu wilayah yang menjadi perhatian besar bagi kita semua dengan jumlah kasus positif terbilang banyak ialah Kota Makassar.

Salah satu penyumbang terbanyak dalam kasus corona di Indonesia adalah Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Makassar menjadi episentrum penyebaran di Sulawesi Selatan. Tercatat hingga juni 2020, Jumlah kasus positif corona di Kota Makassar mencapai angka 3.028 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.984 orang masih menjalani perawatan, di mana 616 orang dirawat di rumah sakit dan 1.368 orang lainnya menjalani isolasi mandiri. Kecamatan Panakukkang menjadi kecamatan dengan jumlah kasus positif terbanyak, dimana 346 orang di kecamatan tersebut masih dirawat. Namun beberapa bulan kemudian berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Makassar yang di lansir dari infocorona.makassar.go.id, per tanggal 13 Desember 2020 total kasus di Makassar mencapai 11.555. Pj Walikota Makassar, Prof.Rudy Djamiluddin yang juga merupakan ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 kota Makassar meminta kepada seluruh aparatnya untuk kembali meningkatkan pengawasan dan lebih mempertegas penerapan protokol kesehatan ditengah masyarakat.

Setelah berbagai kebijakan dan himbauan yang telah dilakukan, nyatanya masih ada juga kasus positif covid-19 yang meningkat. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian yang serius bukan hanya dari pihak pemerintah saja, tetapi juga harus adanya kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Seperti yang terjadi di salah satu Kelurahan di Kota Makassar, yaitu Kelurahan Tamamaung. Kelurahan Tamamaung adalah salah satu wilayah yang terletak Kecamatan Panakukkang

Kota Makassar, yang dimana Kecamatan Panakukkang ini menjadi salah satu kecamatan dengan jumlah kasus positif yang lumayan banyak. Berikut data konfirmasi kasus covid-19 di Kelurahan Tamamaung dari tahun 2020 hingga 2021.

Tabel 1 Data Konfirmasi Tahun 2020 Di Wiker PKM Tamamaung

Kelurahan	Konfirmasi / Positif									
	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust us	Septem ber	Okto ber	Novem ber	Desem ber
Tamamaung	0	1	3	26	42	17	15	15	8	10

Tabel 2 Data Konfirmasi Tahun 2021 Di Wiker PKM Tamamaung

Kelurahan	Konfirmasi / Positif					
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
Tamamaung	97	64	26	6	13	14

Sumber: Puskesmas Tamamaung

Dari data diatas terlihat jelas bahwa sejak bulan april 2020 selalu ada masyarakat yang terkena kasus positif covid-19, hingga terjadi lonjak yang cukup banyak di bulan januari 2021. Juga Dari pengamatan yang peneliti lihat dilapangan bahwa masih ada beberapa warga yang jika keluar rumah tidak mematuhi protokol kesehatan, salah satu yang sangat sering terjadi ialah tidak menggunakan masker. Meraka acuh tak acuh saat melakukan kegiatan diluar rumah tanpa menggunakan masker. Padahal penggunaan masker ini menjadi salah satu faktor penting untuk mencegah penularan covid-19, juga berita dari berbagai

media sosial, yang mengatakan bahwa masih ada warga yang tetap juga berkumpul di tempat umum, seperti di kafe dan warkop. Hal ini menimbulkan berbagai asumsi dari peneliti ialah bertambahnya angka positif covid-19 ini karena lemahnya koordinasi antar- *stakeholder*, dan ketidakpedulian warga atas himbauan dari pemerintah.

Dalam rangkai mengembangkan argument-argumen guna bisa menjelaskan asumsi diatas, membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Upaya Pemerintah Dalam Menanggulangi Covid-19 Di Kelurahan Tamamaung Kota Makassar”**.

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian. Rumusan masalah digunakan untuk menunjukan masalah yang diteliti dan untuk memberikan batasan-batasan dalam penelitian sehingga penelitian tetap fokus pada hal yang benar-benar ingin di teliti.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam menanggulangi covid-19 di Kelurahan Tamamaung Kota Makassar?
2. Bagaimana respon masyarakat terhadap upaya penanggulangan covid-19 di Kelurahan Tamamaung Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka penelitian ini dilaksanakan dengan beberapa tujuan, yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam menanggulangi covid-19 di Kelurahan Tamamaung Kota Makassar
2. Untuk mengetahui seperti apa respon masyarakat dalam upaya menanggulangi covid-19 di Kelurahan Tamamung Kota Makassar

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Ilmiah
 - a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan untuk menambah wawasan keilmuan di bidang sosial dan ilmu politik secara umum, khususnya bagi pembelajaran dan pengembangan Ilmu Admnistrasi Negara mengenai bagaimana upaya pemerintah dalam menaggulangi covid-19 baik di kota ataupun di daerah
 - b. Menambah informasi tentang sejauh mana penerapan penanganan kebijakan pemerintah di tengah maraknya penyebaran virus covid-19 di Kota Makassar.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan tambahan informasi kepada pembaca untuk mengetahui mengenai upaya pemerintah dalam menanggulangi covid-19.
 - b. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi peneliti lain untuk yang akan melakukan penelitian lebih lanjut dengan topik penelitian yang sama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Upaya

1. Pengertian Upaya

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan. Upaya juga berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar.

Menurut (Baskoro, 2012) mendefinisikan upaya adalah usaha atau syarat untuk menyampaikan sesuatu atau maksud (akal, ikhtiar). Menurut (Torsina, 2000) mendefinisikan upaya sebagai suatu kegiatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Menurut (Poerwadaminta, 1986) upaya adalah usaha untuk menyampaikan maksud, akal dan ikhtiar. Upaya merupakan segala sesuatu yang bersifat mengusahakan terhadap suatu hal supaya lebih dapat berdataguna dan berhasil guna sesuai dengan yang dimaksud, tujuan dan fungsi serta manfaat suatu hal tersebut dilaksanakan. Upaya sangat berkaitan erat dengan penggunaan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan tersebut, agar berhasil maka digunakanlah suatu cara, metode dan alat penunjang lainnya.

Berdasarkan beberapa pengertian upaya menurut beberapa ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa upaya merupakan suatu tindakan untuk menyelesaikan persoalan atau masalah-masalah.

2. Jenis-jenis Upaya

- a. Upaya Preventif, mempunyai konotasi ialah sesuatu masalah atau suatu hal yang berusaha untuk dicegah. Adapun sesuatu yang dimaksud itu mengandung bahaya baik bagi lingkup personal maupun global.
- b. Upaya Preservatif, adalah memelihara atau mempertahankan kondisi yang telah kondusif atau baik, jangan sampai terjadi keadaan yang tidak baik.
- c. Upaya Kuratif, yaitu upaya yang bertujuan untuk bisa membimbing seseorang kembali kepada jalurnya yang semula, dari yang mulanya menjadi seseorang bermasalah menjadi seseorang yang bisa menyelesaikan masalah dan terbebas dari masalahnya. Upaya ini pun berusaha untuk bisa membangun rasa kepercayaan diri seseorang agar bisa bersosialisasi dengan lingkungannya.
- d. Upaya Adaptasi, ialah upaya yang berusaha untuk membantu terciptanya penyesuaian antara seseorang dan lingkungannya sehingga dapat timbul kesesuaian antara pribadi seseorang dan lingkungannya.

B. Konsep Pemerintah

1. Pengertian Pemerintah

Pengertian pemerintah dapat dibagi menjadi dua, yaitu: pertama; Pemerintah dalam arti luas menurut A.M. Donner dalam (Muin, 2008) menyebutnya pemerintah dalam arti tertinggi) dan pengertian kedua; adalah pemerintah dalam arti sempit.

Pertama; Konsep *Trias Politica* dan Montesquie membagi pemerintah dalam arti yang luas dalam tiga kekuasaan, yaitu:

1. Kekuasaan membuat Undang-Undang (*legislative power la puissance legislative*).
2. Kekuasaan menjalankan Undang-Undang atau ketentuan peraturan perundang-undangan (*executive power, la puissance executive*).
3. Kekuasaan mengadili (*judicative power, la puissance de juger*).

Istilah pemerintah dalam arti luas dengan membagi kekuasaan secara vertical dalam dua bagian, yang meliputi:

1. Badan-badan / organ-organ negara yang disertai tugas / fungsi untuk merumuskan dan menentukan haluan negara (*policy state*).
2. Badan-badan / organ-organ negara yang disertai tugas / fungsi merealisasikan / melaksanakan haluan negara yang telah ditentukan lebih dahulu (wewenang administrasi).

Komisi van Poeltje pada tahun 1972 dalam (Muin, 2008), laporannya membedakan pemerintah dalam arti luas dan dalam arti sempit. *Pertama*; dalam arti luas diartikan sebagai fungsi, yaitu meliputi keseluruhan tindakan, perbuatan, dan keputusan-keputusan yang diambil oleh alat-alat pemerintah (*bestuurs organen*) untuk mencapai tujuan negara. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit, yaitu hanya meliputi organ / badan / alat / perlengkapan negara yang di serahi tugas pemerintah (*government, bestuur*). *Kedua*, bahwa pemerintahan dalam arti sempit menurut teori *Trias politica*, maupun Van Vollenhoven, hanya meliputi badan / kekuasaan eksekutif (pelaksana = *bestuur*) saja, tidak termasuk badan pembuat undang-undang maupun badan peradilan dan badan kepolisian.

Menurut Max Weber dalam (Muin, 2008) menyimpulkan bahwa pemerintah tidak lain merupakan apa pun yang berhasil menopang klaim bahwa dialah yang secara eksklusif berhak menggunakan kekuatan fisik untuk memaksakan aturan-aturannya dalam suatu wilayah tertentu..

Dalam pandangan lain menurut (Ndraha, 2005), pemerintah adalah segenap alat perlengkapan negara atau lembaga-lembaga kenegaraan yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan. Apapun yang dilakukan pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan tugas negara sehingga pemerintah seringkali disebut juga sebagai representasi negara.

Sedangkan pemerintahan dapat dilihat dari dua sudut, yaitu *pertama*; pemerintahan dalam arti fungsi, yakni kegiatan mencakup aktivitas pemerintah dan *kedua*; pemerintahan dalam arti organisasi, ialah kumpulan dari kesatuan-kesatuan pemerintahan. Menurut (Kencana, 2007), ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurus (eksekuti), pengaturan (legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintah (baik pusat dengan daerah maupun antara penguasa dengan rakyatnya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan yang diharapkan secara baik dan benar. Dengan kata lain, bahwa fungsi pemerintahan adalah segala kegiatan pemerintahan yang tidak termasuk dalam bidang pembentukan undang-undang dan peradilan.

2. Fungsi Pemerintah

Dalam membuat tugas-tugas negara, Menurut pendapat dari Ndara dalam (Muchlis, 2007), pemerintah memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi primer atau fungsi pelayanan, dan fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan.

- a. Fungsi primer atau fungsi pelayanan, yaitu fungsi pemerintah sebagai *provider* jasa-jasa publik yang tidak dapat diprivatisasikan termasuk jasa hankam, layanan sipil, dan layanan birokrasi.
- b. Fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan, yaitu sebagai *provider* kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan barang dan jasa yang mereka tidak mampu penuhi sendiri karena masih lemah dan tak berdaya (*powerless*) termasuk penyediaan pembangunan sarana dan prasarana.

Fungsi primer secara terus-menerus berjalan dan berhubungan positif dengan keberdayaan yang diperintah, artinya semakin berdaya masyarakat, maka semakin meningkat pula fungsi primer pemerintah. Sebaliknya, fungsi sekunder berhubungan negative dengan tingkat keberdayaan yang diperintah, artinya semakin berdaya masyarakat, maka semakin berkurang fungsi sekunder pemerintah dari *rowing* (pengaturan) ke *steering* (pengendalian). Fungsi sekunder secara perlahan-lahan dapat diserahkan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Pemerintah berkewajiban untuk secara terus-menerus berupaya memberdayakan masyarakat agar meningkatkan keberdayaannya sehingga pada gilirannya mereka memiliki kemampuan untuk melayani dirinya sendiri atau memenuhi kebutuhannya secara mandiri terlepas dari campur tangan pemerintah.

Sementara itu, menurut (Ryass, 2000) berpendapat bahwa fungsi-fungsi pemerintahan yaitu fungsi pengaturan, pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan, penjelasannya sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan fungsi pengaturan, yang lazim dikenal sebagai fungsi regulasi dengan segala bentuknya, dimaksudkan sebagai usaha untuk menciptakan kondisi yang tepat sehingga menjadi kondusif bagi berlangsungnya berbagai aktivitas, selain terciptanya tatanan sosial yang baik didalam berbagai kehidupan masyarakat.
- b. Fungsi pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat.
- c. Pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat, dan
- d. Pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

Menurut (Soewargono,1996) dan (Djohan,1998) dalam menyatakan bahwa salah satu fungsi utama dari pemerintah adalah pembuatan kebijakan publik.

Argumentasi terpenting dalam hal ini ialah bahwa semua warga negara akan senantiasa bersentuhan dengan kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah karena yang diatur oleh kebijakan publik tentunya yang menyangkut kepentingan umum. Dengan demikian, dalam pemenuhan atau pelayanan kebutuhan hidup masyarakat, pemerintah memiliki peranan yang penting dan sangat menentukan. Eksistensi pelayanan pemerintah terhadap masyarakat merupakan suatu kebutuhan dan keharusan karena rakyat adalah pemegang saham (sumber-sumber) negara, dimana posisi rakyat adalah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atau kedaulatan atas negara berada di tangan rakyat.

3. Tujuan Pemerintah

Suatu pemerintah dibentuk pasti dengan memiliki berbagai tujuan yang ingin di capai. Tentunya pemerintah harus bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Adapun beberapa tujuan pemerintahan adalah sebagai berikut :

1. Melindungi hak asasi manusia, kebebasan, kesetaraan, perdamaian, dan keadilan bagi seluruh rakyatnya.
2. Menjalankan konstitusi sehingga setiap warga negara diperlakukan dengan seadil-adilnya.
3. Menjaga perdamaian dan keamanan di dalam masyarakat dengan menerapkan hukum secara adil.
4. Melindungi kedaulatan bangsa dari berbagai unsur yang mengancam, baik dari dalam maupun dari luar
5. Membuat dan menjaga sistem moneter sehingga memungkinkan perdagangan domestik dan internasional berjalan dengan baik
6. Menarik pajak dan menetapkan APBN secara bijak sehingga pengeluaran negara tepat sasaran.
7. Membuka dan menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya sehingga kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik.
8. Menjaga hubungan diplomatic dengan negara lain dengan cara membangun kerjasama di berbagai bidang.

C. Pelaksanaan Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan biasanya dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan. Kebijakan publik erat hubungannya dengan administrasi pemerintahan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, serta cara bertindak (tentang perintah, organisasi, dan sebagainya).

Istilah kebijakan publik merupakan terjemahan istilah Bahasa Inggris, yaitu *public policy*. Kata *policy* ada yang menerjemahkan menjadi "kebijakan" Samodra Wibawa; Muhadjir Darwin, dalam (Sahya, 2014) dan ada juga yang menerjemahkan menjadi "kebijaksanaan". Meskipun belum ada kesepakatan bahwa *policy* diterjemahkan menjadi "kebijakan" atau "kebijaksanaan", kecenderungan untuk *policy* digunakan istilah kebijakan. Oleh karena itu, *public policy* diterjemahkan menjadi kebijakan publik.

Menurut James Anderson dalam (Sahya, 2014) mengungkapkan bahwa, *public policies are those policies developed by governmental bodies and officials*" (kebijakan publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah).

Menurut Carl Friedrich dalam (Agustino, 2014), yang mengatakan bahwa kebijakan publik adalah, "serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud." Untuk maksud dari kebijakan sebagai bagian dari kegiatan, Friedrich menambahkan ketentuannya bahwa kebijakan tersebut berhubungan dengan penyelesaian beberapa maksud atau tujuan.

Menurut Easton dalam (Agustino, 2014) yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai pengalokasian kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat. Sehingga hanya cukup pemerintah yang dapat

melakukan suatu tindakan kepada masyarakat dan tindakan tersebut merupakan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pemerintah yang merupakan bentuk dari pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat. Menurut (Thomas R. Dye,1981), kebijakan publik sebagai apa yang tidak dilakukan maupun yang dilakukan oleh pemerintah. Dari defenisi Dye, jelas bahwa kebijakan publik masuk dalam klasifikasi decision making.

Sementara itu, Thomas Dye Thomas Dye dalam (Sahya,2014), mendefenisikan mendefenisikan kebijakan publik sebagai apa pun pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Menurut (Dye,1981) apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, tentu ada tujuannya karena kebijakan publik merupakan "tindakan" pemerintah. apabila pemerintah memilih untuk tidak melakukan sesuatu, juga merupakan kebijakan publik yang tujuannya.

Berdasarkan beberapa pandangan para ahli diatas, pada hakikatnya kebijakan publik dibuat oleh pemerintah berupa tindakan-tindakan pemerintah. Kebijakan publik, baik untuk melakukan maupun tidak melakukan sesuatu mempunyai tujuan tertentu kebijakan publik ditujukan untuk kepentingan masyarakat.

Salah satu konsep politik yanf dikemukakan oleh (Miriam Budiarjo,2009) adalah kebijakan (*policy*). Kebijakan diartikan sebagai aturan yang lahir dari proses politik. Kebijakan merupakan hal yang mengikat sebagai suatu upaya pencapaian tujuan yang diinginkan dengan bersifat strategis dan jangka panjang. Kebijakan harus bisa diimplementasikan ke ruang publik.

Setelah memaparkan makna dari kebijakan, maka secara sederhana kebijakan publik digambarkan sebagai suatu keputusan berdasarkan hubungan kegiatan yang dilakukan oleh actor politik guna menentukan tujuan dan hasil berdasarkan pertimbangan situasi tertentu.

Tujuan dari kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diharapkan oleh publik sebagai konstituen pemerintah. Kebijakan publik sebagai pilihan tindakan yang legal dan sah karena kebijakan publik dibuat oleh lembaga yang memiliki legitimasi dalam sistem pemerintahan. Kemudian, kebijakan publik sebagai hipotesis adalah kebijakan yang dibuat berdasarkan teori, model atau hipotesis mengenai sebab dan akibat. Kebijakan senantiasa bersandar pada asumsi-asumsi mengenai perilaku.

2. Aspek-aspek yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan publik

Menurut Edwards III dalam (Agustino,2014), pelaksanaan kebijakan dapat diartikan sebagai bagian dari tahapan proses kebijaksanaan, yang posisinya berada diantara tahapan penyusunan kebijaksanaan dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan tersebut (*output, outcome*). Lebih lanjut dijelaskan, Edward III mengidentifikasi aspek-aspek yang di duga kuat berkontribusi pada pelaksanaan kebijakan, yakni: komunikasi, sumberdaya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Dari keempat aspek tersebut mempengaruhi pelaksanaan suatu kebijakan, baik secara langsung ataupun tidak

langsung, serta masing-masing aspek saling berpengaruh terhadap aspek yang lainnya.

1) Kewenangan / Struktur Birokrasi

Kewenangan merupakan suatu otoritas / legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Kewenangan ini berkaitan dengan struktur birokrasi yang melekat pada posisi/strata kelembagaan atau individu sebagai pelaksana kebijakan. Karakteristik utama dari birokrasi umumnya tertuang dalam prosedur kerja atau *Standar Operating Procedures* (SOP) dan fragmentasi organisasi.

2) Komunikasi

Komunikasi merupakan aktivitas yang mengakibatkan orang lain menginterpretasikan sesuatu tindakan ide atau gagasan, terutama yang dimaksudkan oleh pembicara atau penulis melalui suatu sistem yang biasa atau lazim baik dengan menggunakan symbol, signal ataupun perilaku. Komunikasi ini mempengaruhi pelaksanaan kebijakan publik, dimana komunikasi yang tidak baik dapat menimbulkan dampak yang buruk bagi pelaksanaan suatu kebijakan. Dimensi komunikasi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan publik terdiri dari; transmisi, konsistensi, dan kejelasan (Winarno, 2012). Pencapaian keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik mensyaratkan pelaksana untuk mengetahui apa yang akan dilakukan secara jelas; tujuan serta sasaran suatu kebijakan harus diinformasikan kepada kelompok sasaran atau target group, sehingga

bisa mengurangi kesenjangan antara rencana dan sasaran suatu kebijakan.

3) Sumberdaya

Adanya pelaksanaan kebijakan harus didukung dengan adanya ketersediaan sumberdaya (manusia, materi, dan metoda). Pelaksanaan kebijakan publik harus dilakukan secara cermat, jelas dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber daya yang diperlukan, maka pelaksanaan kebijakan akan cenderung tidak dapat dilaksanakan secara efektif. Tanpa adanya dukungan sumberdaya, kebijakan hanya akan menjadi dokumen yang tidak diwujudkan untuk memberikan pemecahan masalah yang di kalangan masyarakat, atau upaya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, sumberdaya merupakan suatu faktor yang penting dalam melaksanakan kebijakan publik. Sumberdaya dalam pelaksanaan kebijakan publik diantaranya: staf yang memadai, informasi, pendanaan, wewenang, dan fasilitas pendukung lainnya (Afandi & Warjio, 2015).

4) Disposisi atau sikap dari pelaksana

Disposisi ialah watak serta karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan, seperti komitmen, disiplin, kejujuran, kecerdasan dan sikap demokratis. Apabila pelaksana kebijakan memiliki disposisi yang baik, maka ia akan bisa menjalankan kebijakan dengan baik, sebaliknya apabila pelaksana kebijakan memiliki sikap atau cara pandang yang

berbeda dengan maksud dan arah dari kebijakan, maka dimungkinkan proses pelaksanaan kebijakan tersebut tidak akan efektif dan efisien. Disposisi atau sikap dari para pelaksana akan memberikan dukungan atau hambatan terhadap pelaksanaan kebijakan tergantung dari kesesuaian masing-masing kompetensi dan sikap dari pelaksana. Oleh karena itu, pemilihan serta penetapan personalia pelaksana kebijakan dipersyaratkan individu yang mempunyai kompetensi serta dedikasi yang tepat pada kebijakan yang telah ditetapkan (Afandi & Warjio, 2015).

3. Dimensi Pelaksanaan Kebijakan Publik

Berdasarkan beberapa konsep dan sifat tindakan yang berkenaan dengan pelaksanaan *Good Governance*, pelaksanaan kebijakan dapat diukur / dievaluasi berdasarkan dimensi-dimensi; konsistensi, transparansi, akuntabilitas, keadilan, efektivitas, dan efisiensi.

a. Konsistensi

Pelaksanaan kebijakan berlangsung dengan baik apabila pelaksanaan kebijakan dilakukan secara konsistensi dengan berpegang teguh pada prosedur serta norma yang berlaku.

b. Transparansi

Transparansi merupakan suatu kebebasan akses atas informasi yang patut diketahui oleh publik dan atau pihak-pihak yang berkepentingan. Informasi yang berkenaan dengan pelaksanaan dari kebijakan publik perlu dilakukan secara terbuka, mudah serta dapat diakses oleh semua

pihak yang memerlukan dan disediakan secara memadai, serta mudah dipahami (Rohman, 2016)

c. Akuntabilitas

Setiap aktivitas pelaksanaan kebijakan publik harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara administrasi ataupun substansi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Keadilan

Keadilan umumnya dapat dimengerti sebagai suatu kebaikan, kebajikan, dan kebenaran yang mengikat antar anggota masyarakat dalam mewujudkan keserasian anantara penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban. Keadilan dalam kebijakan publik diwujudkan pada aktivitas pelayanan yang tidak diskriminatif. Pelaksanaan kebijakan publik tidak membedakan kualitas pelayanan pada kelompok sasaran berdasarkan pertimbangan suku, ras, agama, golongan, status sosial dan lain sebagainya.

e. Partisipatif

Partisipatif masyarakat merupakan keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan. Partisipatif masyarakat disamping menopang percepatan pelaksanaan kebijakan, pada lain sisi akan berdampak pada proses evaluasi atau control atas kinerja pemerintah serta mampu menimalisir penyalahgunaan wewenang. Partisipasi masyarakat merupakan kunci sukses dari pelaksanaan

kebijakan publik karena dalam partisipatif menyangkut aspek pengawasan dan aspirasi.

f. Efektivitas

Efektivitas ini menyangkut dengan pencapaian suatu hasil yang sudah ditetapkan, atau pencapaian tujuan dari pelaksanaan tindakan yang berhubungan dengan aspek rasionalitas teknis, dan selalu diukur dari unit produk atau layanan (Dunn, 2003). Dalam pelaksanaan kebijakan publik efektivitas dapat diukur dari keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan pada kebijakan publik.

g. Efisiensi

Efisiensi berkenaan dengan jumlah dari penggunaan sumberdaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi merupakan suatu hubungan antara efektivitas dan penggunaan sumberdaya. Indikator ukuran yang dapat digunakan pada dimensi efisiensi ialah penggunaan sumberdaya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan yang dapat diukur dengan tingkat penggunaan waktu, biaya, manusia, peralatan serta sumberdaya lainnya.

4. Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Publik

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan membutuhkan keterlibatan dari stakeholders secara demokratis dan partisipatif. Stakeholders dengan pembuat kebijakan harus terus menerus terlibat dalam dialog untuk menganalisis konsekuensi dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Maka dari itu, evaluasi pelaksanaan kebijakan perlu dilakukan untuk melihat akuntabilitas dan

peningkatan kinerja suatu kebijakan publik. Berikut beberapa tipe utama dari evaluasi pelaksanaan kebijakan.

a. Evaluasi pada Tahap Perencanaan (*ex-ant*)

Evaluasi ini merupakan evaluasi kebijakan yang dilakukan sebelum kebijakan tersebut diimplementasikan dengan tujuan untuk memilih dan menentukan skala prioritas dari berbagai alternative dan kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Tujuan dari evaluasi *ex-ante* ini ialah memberikan informasi yang relevan dengan kebijakan atau dengan proses pembuatan kebijakan yang sedang berjalan.

b. Evaluasi pada Tahap Pelaksanaan (*on-going*)

Evaluasi *on-going* merupakan evaluasi yang dilakukan pada saat pelaksanaan kebijakan untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan kebijakan dibandingkan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Evaluasi ini secara umum dimaksudkan untuk menjamin agar tindakan yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, bukan dimaksud untuk evaluasi penilaian akhir capaian kinerja pelaksanaan kebijakan. Esensi dari evaluasi *on-going* ini ialah untuk dapat memberikan informasi yang relevan yang dapat dipergunakan untuk memperbaiki proses pelaksanaan kebijakan kearah yang hendak dicapai.

c. Evaluasi pada Tahap Pasca-Pelaksanaan (*ex-post*)

Ex-post evaluation adalah model evaluasi klasik dari evaluasi pelaksanaan kebijakan. Evaluasi *ex-post* dimaksudkan untuk memberikan penilaian terhadap tingkat pencapaian tujuan serta dampak dari kebijakan yang telah dilaksanakan. Evaluasi *ex-post* merupakan evaluasi yang dilaksanakan

setelah pelaksanaan kebijakan berakhir, yang ditujukan untuk menganalisa tingkat pencapaian (keluaran / hasil / dampak) pelaksana kebijakan.

D. Respon Masyarakat

1. Respon

Respon berasal dari kata *response*, yang memiliki arti balasan atau tanggapan (*reaction*). Respon yaitu istilah yang digunakan dalam psikologi untuk menakan reaksi terhadap adanya rangsangan yang diterima melalui panca indra. Hal yang menunjang serta melatarbelakangi ukuran dari suatu respon ialah sikap, persepsi dan partisipasi. Dalam prosesnya respon diawali dengan sikap seseorang, karena sikap sendiri merupakan suatu kecenderungan atau kesedihan yang dimiliki seseorang untuk bertindak laku jika menghadapi suatu rangsangan tertentu.

Secara umum bisa dikatakan bahwa terdapat tiga faktor yang bisa mempengaruhi respon dari seseorang, tiga faktor tersebut antara lain:

- a. Berasal dari diri orang yang bersangkutan yang melihat dan berusaha memberikan interpretasi mengenai apa yang telah dilihatnya, ia dipengaruhi oleh sikap, motif, kepentingan dan harapannya.
- b. Sasaran respon tersebut, berupa orang benda, atau peristiwa. Sifat-sifat dari sasaran itu sendiri biasanya berpengaruh terhadap respon yang melihatnya. Dengan kata lain, gerakan, suara, ukuran, tindakan-tindakan, serta ciri-ciri lain dari sasaran respon turut menentukan cara pandang orang.
- c. Faktor situasi, respon dapat dilihat secara kontekstual yang berarti dalam situasi mana respon itu muncul atau timbul mendapat perhatian.

Situasi merupakan faktor yang turut berperan dalam pembentukan atau tanggapan seseorang.

Respon dapat diartikan pula ketika seseorang memberikan reaksinya melalui sikap, pemikiran, serta perilaku. Sikap yang ada pada diri seseorang akan memberikan warna pada perilaku atau perbuatan seseorang. Secara umum respon dapat diartikan sebagai hasil atau kesan yang didapat dari sebuah pengamatan.

Berdasarkan teori yang kutip dari psikologi komunikasi karangan Jalaluddin Rahmat, respon dapat dibagi menjadi tiga, antara lain sebagai berikut:

1. Kognitif, yang dimaksud dengan respon kognitif ialah respon yang berkaitan erat dengan pengetahuan keterampilan dan informasi seseorang mengenai sesuatu. Respon ini timbul apabila adanya suatu perubahan terhadap apa yang dipahami oleh masyarakat.
2. Afektif, yang dimaksud dengan respon afektif ialah respon yang berkaitan dengan emosi, sikap, dan menilai dari seseorang terhadap suatu hal.
3. Konatif, yang dimaksud dengan respon konatif sendiri ialah respon yang berhubungan dengan perilaku nyata meliputi tindakan atau kebiasaan.

Jadi antara respon juga tanggapan sebenarnya saling berkaitan, dan jawaban dapat muncul disebabkan oleh adanya suatu gejala atau peristiwa yang mendahuluinya.

2. Masyarakat

Manusia ialah jenis makhluk yang hidup secara berkelompok. Ada berbagai macam wujud kesatuan kelompok manusia yang hidup di muka bumi ini, wujud dari kesatuan kelompok tersebut paling lazim dikenal dengan sebutan masyarakat. Dalam Bahasa Inggris dipakai istilah *society* yang berasal dari Bahasa Latin *socius*, yang berarti “kawan”. Istilah masyarakat sendiri berasal dari akar kata Arab *syaraka* yang memiliki arti “ikut serta, berpartisipasi”.

Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling “bergaul”, atau dengan istilah ilmiah, saling “berinteraksi”. Adanya prasarana untuk berinteraksi menyebabkan warga dari suatu kelompok manusia itu saling berinteraksi. Sebaliknya, jika hanya adanya suatu potensi untuk berinteraksi saja belum berarti bahwa warga dari suatu kesatuan manusia tersebut benar-benar akan berinteraksi.

Menurut J.L Gillin dan J.P. Gillin dalam buku mereka *Cultural Sociology* (1954):hlm.139), yang mengatakan bahwa masyarakat atau *society* adalah “*the largest grouping in which common customs, traditions, attitudes and feelings of unity are operative*”. Unsur *grouping* dalam definisi tersebut menyerupai unsur “kesatuan hidup”, unsur *common customs* dan *traditions* ialah unsur “identitas baru”.

Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya sosiologi suatu pengantar mengatakan bahwa masyarakat adalah orang yang hidup bersama yang menghasilkan suatu kebudayaan. Dengan demikian, tak ada masyarakat yang tidak mempunyai kebudayaan dan sebaliknya tidak ada kebudayaan tanpa masyarakat sebagai wadah dan pendukungnya.

Respon masyarakat terhadap covid-19 terbilang bervariasi. Meski begitu hal ini bisa mengarah pada perilaku seseorang untuk bertindak secara positif dalam mencegah penularannya. Agar bisa memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya penanganan virus ini, penting juga untuk mengetahui media penyalurannya yang tepat. Sumber informasi yang paling dipercaya masyarakat mengenai virus corona ini ialah melalui media televisi, kemudian bisa diikuti melalui koran, radio, media-media sosial, dan juga dari berbagai situs internet. Masyarakat juga harus terus diberikan komunikasi dan harus terus diingatkan mengenai kampanye memakai masker, menjaga jarak aman, dan mencuci tangan.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan dan menunjang penelitian “Upaya Pemerintah Dalam Menanggulangi Covid-19 Di Kelurahan Tamammaung Kota Makassar”, penulis melakukan peninjauan terhadap penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang pada dasarnya memiliki tema yang sama yaitu “Upaya Pemerinta”. Hal ini dianggap penting bagi penulis karena sekaligus untuk mengetahui perbedaan ataupun kesamaan penelitian terdahulu dan penelitian yang sekarang.

Berikut beberapa hasil penelitian terdahulu yang dianggap memiliki kesesuaian dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu:

Tabel 3 Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Nama Peneliti dan Tahun	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1.	Upaya Pemerintah Daerah Dalam	Nasrullah (2013)	Bagaimana Usaha Pemerintah Daerah	➤ Terdapat upaya pemerintah daerah dalam

No	Judul Penelitian	Nama Peneliti dan Tahun	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
	Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan di Kabupaten Aceh Barat.		Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Aceh Barat?	meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Aceh Barat salah satu indikasinya adalah telah terjadi peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran, dan terdapat upaya penyuluhan yang dilakukan yaitu baik dengan pemasangan reklame maupun media cetak yang tersebar di Kabupaten Aceh Barat.
2.	Upaya Pemerintah Dalam Menanggulangi Kemiskinan Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di Kabupaten Muaro Jambi	Ratumas Aulia Novitri (2019)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Upaya pemerintah dalam program pnpm di kabupaten di kelurahan pijoan? ➤ Bagaimana proses pengeluaran pencairan pinjaman dana PNPM di Kelurahan Pijoan? ➤ Kendala yang menyebabkan terjadi penunggakan peminjaman uang kredit PNPM di Kelurahan Pijoan? 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Bahwa upaya kantor PNPM ini memberikan pelayanan yang cukup baik, bagi masyarakat khususnya untuk rumah tangga miskin atau yang memiliki kendala yang dimana masyarakat juga ada beberapa yang sangat mengeluh dengan kurangnya konsistensi waktu karena kantor tersebut tidak sesuai jadwal dalam menjalankan dan memberikan waktu konsistensi terhadap masyarakat, maka PNPM harus meningkatkan kedisiplinan dan pelayanan yang lebih agar pihak PNPM dan masyarakat dapat saling berinteraksi. ➤ Salah satu cara untuk melakukan pengeluaran dana pinjaman PNPM ada beberapa tahap yang harus dilakukan, tahap pertama peminjam harus

No	Judul Penelitian	Nama Peneliti dan Tahun	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
				melakukan/mengajukan proposal kepada pihak PNPM kelurahan pijoan, tahap kedua ialah melakukan verifikasi kepada warga yang melakukan peminjaman, dan tahap ketiga ialah proses pencairan kepada pihak peminjaman dana.
3.	Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata (studi kasus di desa jetis nusawungu kabupaten cilacap)	Nur Hidayat (2019)	Bagaimana upaya peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat melalui pengembangan desa wisata di desa Jetis, Kec. Nusawungu, Kab. Cilacap	➤ Bahwa upaya peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat melalui pengembangan desa wisata sudah menghasilkan kesejahteraan sosial masyarakat, namun belum terlaksana secara maksimal. Indikator kesejahteraan sosial masyarakat dari segi materi berdasarkan kebutuhan rumah tempat tinggal, kendaraan pribadi dan segi spiritual berdasarkan angka kriminalitas telah cenderung bagus. Namun, kesejahteraan sosial dari segi mental berdasarkan tingkat lulusan pendidikan dan segi fisik berdasarkan kebersihan lingkungan masih belum cukup baik.

F. Kerangka Konsep

Kerangka konseptual merupakan penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek suatu penelitian berdasarkan tinjauan pustaka yang sudah

diuraikan sebelumnya atau bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

Berikut ini dikemukakan kerangka yang berfungsi sebagai penuntun sekaligus mencerminkan alur pikir dan merupakan dasar analisis.



Gambar 1: Kerangka Konseptual



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu melakukan wawancara secara mendalam. Dengan menggunakan metode deduktif yang mana mengkaji fenomena-fenomena secara umum untuk menemukan hasil secara spesifik. Menurut (Sugiyono,2015) yang mengemukakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan daripada generalisasi.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian deskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai permasalahan-permasalahan yang diteliti, mengidentifikasi dan menjelaskan data yang ada secara sistematis. Tipe deskriptif didasarkan pada peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat peneliti melakukan penelitian kemudian menganalisisnya dan membandingkan dengan kenyataan yang ada dengan teori dan selanjutnya menarik sebuah kesimpulan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang dijadikan tempat penelitian ini adalah berada di Kelurahan Tamamaung Kecamatan Panakukkang Kota Makassar, menurut peneliti lokasi tersebut dijadikan wilayah yang cocok untuk tempat penelitian karena hadirnya covid-19 ini membuat pemerintah berupaya semaksimal mungkin untuk menghentikan laju penyebarannya virus ini, dan dari masyarakat sendiri memberikan berbagai respon yg berbeda-beda terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, salah satunya yang terjadinya di Kelurahan Tamamaung ini.

2. Waktu Penelitian

Waktu yang dibutuhkan dalam penelitian yaitu selama 2 bulan, pada tahun 2021.

C. Sumber Data Penelitian

Menurut (Sugiyono,2013) bahwa kriteria data dalam penelitian kualitatif adalah data yang sifatnya pasti. Data pasti yaitu data yang sebenar-benarnya terjadi. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Berikut penjelasannya:

1. Data Primer

Menurut (Umi Nariwati,2008) adalah “data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk file-file”. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi.

2. Data Sekunder

Menurut (Sugiyono,2008) data sekunder ialah: “sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data”.

Contohnya seperti orang lain atau dokumen-dokumen. Data sekunder bersifat data yang mendukung keperluan data primer. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen jurnal, dokumen kantor terkait, dan penelusuran data online.

D. Deskripsi Fokus dan Indikator Penelitian

Deskripsi fokus merupakan istilah dalam penelitian kualitatif yang digunakan untuk mendeskripsikan suatu konsep agar penelitian lebih terarah dalam membahas apa yang menjadi fokus permasalahan. Berdasarkan hal tersebut, fokus penelitian ini mengarah pada Upaya Pemerintah Dalam Menanggulangi Covid-19 yang mencangkup indikator sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kebijakan pemerintah

Menurut Edwards III dalam (Agustino,2014) pelaksanaan kebijakan dapat diartikan sebagai bagian dari tahapan proses kebijaksanaan. Edward III mengidentifikasi aspek-aspek yang di duga kuat berkontribusi pada pelaksanaan kebijakan,antara lain:

a. Kewenangan / Struktur Birokrasi

Kewenangan merupakan suatu otoritas / legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Kewenangan ini berkaitan dengan struktur birokrasi yang melekat pada posisi/strata kelembagaan atau individu sebagai pelaksana kebijakan. Karakteristik utama dari birokrasi umumnya tertuang dalam prosedur kerja atau *Sandar Operating Procedures* (SOP) dan fragmentasi organisasi.

b. Komunikasi

Pencapaian keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik mensyaratkan pelaksana untuk mengetahui apa yang akan dilakukan secara jelas; tujuan serta sasaran suatu kebijakan harus diinformasikan kepada kelompok sasaran atau target group, sehingga bisa mengurangi kesenjangan antara rencana dan sasaran suatu kebijakan.

c. Sumberdaya

Adanya pelaksanaan kebijakan harus didukung dengan adanya ketersediaan sumberdaya (manusia, materi, dan metoda). Tanpa adanya dukungan sumberdaya, kebijakan hanya akan menjadi dokumen yang tidak diwujudkan untuk memberikan pemecahan masalah yang di kalangan masyarakat, atau upaya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

d. Disposisi atau sikap dari pelaksana

Disposisi ialah watak serta karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan, seperti komitmen, disiplin, kejujuran, kecerdasan dan sikap demikratis. Apabila pelaksana kebijakan memiliki disposisi yang baik, maka ia akan bisa menjalankan kebijakan dengan baik, sebaliknya apabila pelaksana kebijakan memiliki sikap atau cara pandang yang berbeda dengan maksud dan arah dari kebijakan, maka dimungkinkan proses pelaksanaan kebijakan tersebut tidak akan efektif dan efisien

2. Respon Masyarakat

a. Kognitif

Respon afektif yaitu respon yang berkaitan erat dengan dengan pengetahuan keterampilan dan informasi seseorang mengenai sesuatu.

Respon ini timbul apabila adanya suatu perubahan terhadap apa yang dipahami oleh masyarakat.

b. Afektif

Afektif sendiri ialah respon yang berkaitan dengan emosi, sikap, dan menilai dari seseorang terhadap suatu hal.

c. Konatif

Respon konatif sendiri ialah respon yang berhubungan dengan perilaku nyata meliputi tindakan atau kebiasaan.

E. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi. (Sukandarumidi,2002) memberikan pandangan bahwa informasi penelitian adalah sesuatu baik orang, benda ataupun lembaga (organisasi), yang sifat keadaannya di teliti.

Informan yang dimaksud adalah pihak-pihak yang memberikan informasi yang terkait dengan upaya pemerintah dalam menanggulangi covid-19 di Kelurahan Tamamung.

Adapun informan dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala Kelurahan Tamamaung
2. Kepala Puskesmas Tamamaung
3. Tokoh Masyarakat Kelurahan Tamamaung
4. Masyarakat Kelurahan Tamamung

F. Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. penelitian deskriptif kualitatif menampilkan hasil data apa adanya tanpa proses manipulasi atau perlakuan lain. Menurut Nazir dalam bukunya Metode penelitian, Metode deskriptif adalah satu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu subjek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran atau pun kelas peristiwa pada masa sekarang.

Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. . Penelitian ini akan mendeskripsikan bagaimana upaya pemerintah dalam menanggulangi covid-19 di Kelurahan Tamamaung kota Makassar.

G. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

1. Observasi

Menurut (Nasution,1988) menyatakan bahwa, observasi adalah dasar utama ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data ini dikumpulkan dan seiring bantuan berbagai alat yang sangat canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil dapat diobservasi dengan jelas. Dengan observasi di lapangan peneliti akan lebih mampu memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial. Jadi akan diperoleh pandangan yang holistic dan menyeluruh. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat mengenai masalah yang akan diteliti, maka peneliti menggunakan observasi, dimana peneliti berada dilokasi atau instansi terkait untuk mengumpulkan data.

2. Wawancara

Menurut (Sugiyono,2015), wawancara adalah “pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu”.

Lincoln dan Guba dalam Sanapiah Faisal, mengemukakan ada tujuh langkah dalam penggunaan wawancara untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif, yaitu :

- 1) Menetapkan kepada siapa wawancara itu akan dilakukan
- 2) Menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan pembicaraan
- 3) Mengawali atau membuka alur wawancara
- 4) Melangsungkan alur wawancara
- 5) Mengkonfirmasi ikhtisar hasil wawancara dan mengakhirinya
- 6) Menuliskan hasil wawancara kedalam catatan lapangan
- 7) Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh

Wawancara yang baik dilakukan *face to face* maupun yang menggunakan pesawat telepon, akan selalu terjadi kontak pribadi, oleh karena itu pewawancara perlu memahami situasi dan kondisi, sehingga dapat memilih waktu yang tepat kapan dan dimana harus melakukan wawancara. Dalam penelitian ini, peneliti akan mewawancarai informan yang berada di wilayah Kelurahan Tamamung dan instansi yang berada di wilayah tersebut.

3. Dokumentasi

Menurut (Sugiyono,2015) menyatakan bahwa “dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu”. Dokumen bisa berbentuk tulisan, atau karya-karya monumental dari seseorang.

Menurut Herdiansyah dalam (Sugitono,2015) dokumentasi ialah “salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh obyek sendiri atau orang lain tentang subyek”.

Teknik dokumentasi dilakukan untuk melengkapi data yang tidak didapatkan dari proses wawancara. Data dalam penelitian kualitatif kebanyakan diperoleh dari sumber manusia atau *human resource*, melalui observasi dan wawancara, diantaranya dokumen berupa peraturan perundang-undangan, buku harian, laporan kegiatan panduan pelaksanaan kegiatan, arsip-arsip, foto-foto, dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian.

H. Teknik Pengabsahan Data Penelitian

Dalam penelitian harus memiliki keabsahan data sehingga dapat dipertanggung jawabkan. Keabsahan penelitian kualitatif adalah ketika mampu menggambarkan situasi dilapangan melalui narasi kalimat yang tepat tanpa mengurangi atau menambahkan realitas yang sesungguhnya. Menurut pandangan Sugiyono ada beberapa upaya yang bisa dilakukan dalam rangka mendukung kredibilitas suatu penelitian ilmiah, upaya tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Pemanjangan pengamatan

Ketika penelitian sudah dilakukan namun masih ada data yang dianggap perlu untuk dikonfirmasi kembali maka peneliti melakukan perpanjangan penelitian dengan cara kembali ke lokasi dimana penelitian itu telah dilakukan. Peneliti kembali lagi kelapangan untuk melakukan pengamatan dalam rangka verifikasi data agar menjadi suatu kebenaran yang valid terhadap data yang diperoleh.

2. Meningkatkan ketekunan

Ketekunan dalam suatu penelitian adalah proses dalam melakukan pencermatan terhadap suatu data yang diperoleh dalam suatu penelitian. Dengan demikian ketekunan tersebut, maka peneliti akan melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan sudah sesuai dengan sebenarnya atau tidak.

3. Triangulasi

Pada tahap ini semua data yang telah diperoleh dilakukan pengecekan data dengan mengkonfirmasi data kepada berbagai sumber data dan berbagai waktu. Hal tersebut dianggap penting dilakukan untuk mengupdate data informasi dan ilmu pengetahuan yang begitu sangat cepat berkembang dan berubah-ubah.

4. Analisis kasus negatif

Pada dasarnya adalah melakukan perbandingan suatu data yang dapat berupa perbedaan atau pertentangan dengan data sebelumnya. Dalam tahap ini jika data yang ada dan ketika dilakukan pencocokan dan

tidak lagi ditemukan perbedaan maka data tersebut sudah dapat dipercaya kebenarannya.

5. Menggunakan bahan referensi

Penggunaan bahan referensi dimaksudkan untuk mendukung kevalidan suatu data yang diperoleh dilapangan dengan cara mencocokkan dengan referensi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Referensi penelitian dapat berupa pernyataan para informan yang satu dengan yang lainnya.

I. Teknis Analisis Data

Data yang dikumpulkan baik data sekunder maupun hasil wawancara mendalam yang dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu dengan memaparkan data dan informasi yang diperoleh sebagaimana adanya, selanjutnya dilakukan analisis dengan interpretasi sesuai dengan kecenderungan data.

1. Pengumpulan Data

Merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara dan observasi.

2. Reduksi Data

Dari lokasi penelitian, data lapangan ditunangkan dalam uraian laporan lengkap dan terperinci. Data dan laporan lapangan kemudian direduksi. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data pasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Reduksi data dilakukan terus menerus selama proses

penelitian berlanjut. Pada tahap ini setelah data dipilah kemudian disederhanakan, data yang tidak diperlukan disortir agar memberi kemudahan dalam penampilan, penyajian, serta untuk menarik kesimpulan sementara.

3. Penyajian Data

Untuk mempermudah peneliti untuk dapat melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data penelitian maka dilakukan penyajian data (display data). Display data ialah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan kesimpulan serta pengambilan tindakan.

4. Penarikan kesimpulan

Data yang telah direduksi dan disajikan untuk selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan akhir untuk menjawab permasalahan yang dihadapi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kelurahan Tamamaung ialah salah satu kelurahan yang terletak di Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Luas wilayah Kelurahan Tamamaung sendiri sekitar 116 ha/m², dengan jumlah penduduk sekitar 30.145 jiwa yang terdiri dari 15.095 jiwa laki-laki dan 15.050 jiwa perempuan dan memiliki 62 RT dan 8 RW. Titik koordinat Kelurahan Tamamaung yaitu 5°08'58.8"S119°26'35.1"E. Letak posisi sebelah utara bertasan langsung dengan kelurahan Sinrijala, sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Karampuang, dan sebelah barat berbatasan dengan Bara-baraya.

Asal mula pemberian nama Tamamaung ketika pada zaman dahulu kala terdapat seseorang bernama 'Tau Manurung' ingin membangun sebuah rumah ditengah hutann, tetapi tidak disetujui oleh pihak kerajaan Gowa. Tau Manurung tetap bersikeras mendirikan rumah tersebut hingga jadi tetapi pada keesokannya rumah tersebut telah hilang.Kejadian tersebut yang menjadi cikal bakal hadirnya penamaan pada Kelurahan Tamamaung, yang mana tempat dari pendirian rumah tersebut dikenal masyarakat setempat sebagai "Kampung Balla Tanjaria Nibangung" yang dikenal dengan nama kampung Tamabangung atau Tamamangung (makassar.tribunnews.com)

1. Visi dan Misi Kelurahan

Kelurahan Tamamaung memiliki visi dan misi yaitu **"Mewujudkan Pelayanan Publik yang Professional dan Pemberdayan Sumber Daya Menuju Kesejahteraan"**

Adapun kandungan dari visi tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan pelayanan prima terhadap seluruh stakeholder masyarakat
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan ketentraman dan keterlibatan umum.
3. Mendorong Partisipasi masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, indah, aman dan nyaman.
4. Mendukung sumber daya lokal melalui pelatihan keterampilan (life skill) yang bernilai ekonomi.
5. Pembinaan mental dan spiritual antar umat beragama.

1. Nomor Kode POS 90231			
2. Kecamatan : Panakukkang			
3. Kota : Makassar			
4. Provinsi : Sulawesi Selatan			
A. Data Umum			
1. Luas Wilayah	116 ha/m ²	3. Tingkat Pendidikan Masyarakat	
a. Sebelah Utara	Sinrijala	a. Lulusan Pendidikan umum	
b. Sebelah Selatan	Karampuang	1. TKK	-
c. Sebelah Barat	Bara-baraya	2. SD/ sederajat	1834 orang
d. Sebelah Timur	Timur	3. SMP/ sederajat	1119 orang
2. Jumlah Penduduk		4. SMA/SMU	325 orang
a. Laki-laki	15.095	5. Akademi/D1-D3	56 orang
b. Perempuan	15.050	6. Sarjana	352 orang
B. Data Personil			
1. Nama Lurah	Armi Maroa,SE		
NIP	19760404200902002		
2. Sekretaris Lurah			
1. Kasi Pemerintahan			
3. Kasi Perekonomian	Tita Irsani D. S.Sos		
NIP	197109201994022001		
4. Kasi Pengelolaan kebersihan	Nasrullah AMD		
NIP	198102122010011014		

Tabel 4 Profil Kelurahan Tamamaung

B. Identitas Informan

Dalam proses pengumpulan data, terdapat beberapa informan yang peneliti ambil, yakni sebagai pihak yang bisa memberikan data menyangkut fokus dari penelitian tersebut yang diperoleh melalui teknik *purposive sampling*. Sesuai dengan judul penelitian ini maka penulis mengambil informasi dari beberapa pemerintah Kelurahan, yaitu Kepala Lurah, Sekretaris Lurah, Kepala Puskesmas dan masyarakat. Untuk Mengetahui keabsahan data yang diperoleh khususnya dari pihak informan, maka berikut adalah informasi mengenai informan:

1. Kepala Lurah Tamamaung

Armi Maroa SE,M.A.P adalah kepala Lurah Tamamaung yang menjabat sejak maret 2020. Beliau adalah seorang wanita yang usianya sekitar 41 tahun. Saat ini beliau sedang menjalankan masa pemerintahannya menuju tahun ke dua sejak tahun 2020. Tugas utama dari Kepala Lurah sebagai berikut:

- a. Mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- b. Melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh walikota

2. Kepala Seksi Pemerintahan Pengelolaan Jaringan dan Pemberdayaan

Nasrullaah A. S.Sos adalah kepala seksi Pengelolaan Jaringan dan Pemberdayaan Kelurahan Tamamaung. Tugas dari Kepala Seksi ialah sebagai berikut;

- a. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan kelurahan.

- b. Memberikan bimbingan, supervise, fasilitas dan konsultasi pelaksanaan administrasi kelurahan.
 - c. Membantu mempersiapkan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap lurah.
3. Bapak Hayiddin Skm selaku sebagai Kepala Badan Tata Usaha puskesmas Tamamaung. Usia beliau sekitar 38 tahun. Adapun tugasnya yaitu, pengelolaan urusan ketatausahaan, pengelolaan urusan umum dan perlengkapan, pengelolaan administrasi kepegawaian, dan pengelollan administrasi keuangan.
 4. Bapak Abdul Rajab informan dari kategori tokoh masyarakat. Beliau berusia sekitar 70 tahun. Bagi peneliti pendapat dari tokoh masyarakat yang merupakan salah satu orang yang di tuakan di masyarakat mampu memberikan pendapat untuk mengetahui terkait respon dalam upaya penanggulangan covid-19.
 5. Saudara Ajis dari kategori masyarakat yang berprofesi sebagai penjual nasi kuning didaerah sukamaju 4 Kelurahan Tamamaung. Ajis berusia sekitar 25 tahun sebagai pelaku usaha.
 6. Ibu Fatima dari kategori janda yang setiap hari bekerja sebagai penjual minuman didaerah sukamaju raya. Ibu Fatima berusia sekitar 37 tahun.
 7. Jhon isa dari kategori masyarakat yang berprofesi sebagai mahasiswa semester 6. Usianya sekitar 21 tahun. Menurut peneliti penting untuk mendapatkan informasi dari anak muda yang memiliki pendidikan lebih dalam merespon penanggulangan covid-19 di Kelurahan Tamamaung.

8. Saudara Arfan juga dari kategori masyarakat yang berusia sekitar 30 tahun yang berprofesi sebagai karyawan di

C. Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Dalam Menanggulangi Covid-19

Mengenai bagaimana pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam menanggulangi covid-19 di Kelurahan Tamamaung, maka akan dibahas dalam beberapa indikator sebagai berikut :

a. Kewenangan / struktur birokrasi

Birokrasi merupakan struktur tatanan organisasi, pembagian kerja dan hierarki yang terdapat pada sebuah lembaga yang penting untuk menjalankan tugas-tugas agar lebih teratur. Birokrasi sebagai suatu sistem otoritas yang ditetapkan secara rasional oleh berbagai macam peraturan untuk mengkoordinasi segala pekerjaan yang dilakukan. Dalam pelaksanaannya, birokrasi mempunyai prosedur atau aturan yang bersifat tetap, serta rantai komando yang berupa hierarki kewenangan yang mengalir dari atas ke bawah. Berdasarkan pembahasan diatas peneliti melakukan wawancara bersama Kepala Lurah Tamamaung Armi Maroa, SE,M.A.P untuk melihat bagaimana kewenangan/struktur birokrasi yang dilakukan pemerintah setempat dalam menjalankan proses kebijakan.

Sejauh ini kewenangan yang kami lakukan ialah mengikuti aturan prosedur dari walikota. Kami pihak kelurahan tentunya harus mengikuti prosedur dari atas. Setelah ada prosedur dari walikota kami akan menindak lanjuti seperti menyampaikan kepada pihak RT/RW terkait segala bentuk kebijakan yang harus dilakukan dan

nantinya mereka akan menyampaikan kemasyarakat. Dalam mendukung kebijakan dari walikota ini juga kami di kelurahan melakukan beberapa prokes di kelurahan. (wawancara, Armi Maroa, SE, M.A.P, 11 juni 2021)

Lebih lanjut dijelaskan bahwa :

Kami juga akan menjalankan kebijakan Makassar Recover yang diterapkan oleh walikota yang nantinya akan dilaksanakan pada semua kelurahan di Makassar.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Nasrullah A. S.Sos selaku Kepala Seksi Pemerintahan Pengelolaan Jaringan dan Pemberdayaan di Kelurahan Tamamaung

Untuk saat ini kami sedang menjalankan kebijakan dari walikota yaitu Makassar Recover, baik, kami tentunya terus melakukan pengawasan kepada masyarakat apalagi di tempat-tempat umum seperti pasar, tempat ibadah, biasanya juga kami bersama pihak keamanan/tim gugus tugas turun untuk membagikan masker, handsanitizer dan melakukan pengumuman atau himbauan kepada masyarakat terkait mencegah penularan covid-19. (Wawancara, Nasrullah A. S.Sos, 11 Juni 2021)

Bedasarkan dari pernyataan informan diatas bahwa pihak kelurahan menjalankan kebijakan dengan mengikuti kewenangan dari Walikota, mereka juga melakukan prokes-prokes di kelurahan seperti penyediaan tempat cuci tangan di berbagai lokasi, pembagian masker dan juga handsanitizer kepada masyarakat terkhususnya di tempat umum, menghimbau masyarakat untuk menjaga jarak. Pemerintah kelurahan akan menjalankan Kebijakan Makassar Recover yang ditetapkan oleh Walikota.

Yang mana Makassar Recover atau *Smart Emergency Protocol Against Covid-19 and Service (Recover)* ialah upaya atau tindakan yang dilakukan dengan melalui protokol penanganan secara cepat dan terukur berkenaan dengan penanganan dan pelayanan Covid-19. Kebijakan tersebut termuat dalam Peraturan Walikota Makassar No 5 Tahun 2021 yang di tandatangani pada 15 Maret 2021 yakni sebagai suatu panduan untuk meningkatkan imunitas kesehatan masyarakat selama masa pandemi, menjadikan masyarakat agar mampu untu beradaptasi dan sebagai suatu langka pemulihan ekonomi daerah.

Pandemi covid-19 merupakan situasi yang terjadi secara mendadak dan cepat. Peran penting dari tenaga kesehatan sangat penting dalam penangan covid-19 pada setiap level intervensi. Pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya. Berikut peneliti melakukan wawancara bersama kepala Badan Tata Usaha Puskesmas Tamamaung Bapak Hayiddin.Skm

Puskesmas tetap melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan mengikuti aturan yang terdapat pada pedoman pencegahan dan pengendalian covid-19 revisi 4 tahun 2020, tapi itu semua harus melalui Dinas Kesehatan dan dalam menjalankan tugas tentunya kami harus bekerjasama dengan pihak kelurahan. kami menunggu laporan dari kelurahan terkait ada yang terdampak covid-19 atau orang dalam pemantauan (ODP), dan pasien dalam

pengawasan (PDP). Nah,, setelah itu baru kami bisa turun melakukan tindakan seperti memberikan pelayanan dan memberikan rujukan ke Rumah sakit. (Wawancara, Hayiddin Skm, 14 Juni 2021)

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa pihak puskesmas Tamamaung bekerja dengan mengikuti aturan pada pedoman pencegahan dan pengendalian covid-19 revisi 4 tahun 2020 dimana harus didukung dengan peran Dinas Kesehatan agar dapat berjalan optimal serta dalam menjalankan tugas pihak puskesmas tentunya harus bekerjasama dengan kelurahan karena puskesmas akan menampung segala bentuk informasi dari kelurahan agar bisa menindak lanjuti terkhususnya dalam proses pelayanan. Peran Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dalam pencegahan dan pengendalian covid-19 dalam hal ini adalah puskesmas dengan jejaringnya antara lain klinik pratama, klinik perseorangan, bersama melakukan deteksi, prevensi, dan respon pengendalian covid-19.

Adapun pola deteksi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Surveilans ILI dan pneumonia melalui SKDR.
2. Surveilans aktif/pemantauan terhadap pelaku perjalanan dari wilayah/negara terjangkit.
3. Membangun dan memperkuat jejaring kerja surveilans dengan pemangku kewenangan, LS dan tokoh masyarakat.

Sedangkan sistem yang prevensi yang dilakukan:

1. Melakukan komunikasi risiko termasuk penyebarluasan media KIE covid-19 kepada masyarakat.
2. Pemantauan ke tempat-tempat umum.

Kemudian mekanisme respon yang dioperasikan adalah sebagai berikut :

1. Tata laksana klinis sesuai kondisi pasien.
2. melakukan rujukan ke RS sesuai indikasi medis.
3. Memperhatikan prinsip PPI.
4. Notifikasi kasus 1 × 24 jam secara berjenjang.
5. Melakukan Penyelidikan epidemiologi berkoordinasi dengan Dinkes Kab/kota.
6. Mengidentifikasi kontak erat yang berasal dari masyarakat & petugas kesehatan.
7. Melakukan pemantauan kesehatan PDP ringan, ODP, OTG.
8. Mencatat dan melaporkan hasil pemantauan secara rutin.
9. Edukasi pasien untuk isolasi diri di rumah.
10. Melakukan komunikasi risiko kepada keluarga dan masyarakat.
11. Pengambilan specimen dan berkoordinasi dengan Dinkes setempat terkait pengiriman specimen

Berdasarkan dari hasil wawancara bersama informan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam menanggulangi wabah covid-19 pihak kelurahan tetap menjalankan kebijakan mengikuti kewenangan dari Walikota Makassar, juga melakukan prokes-prokes di kelurahan terkait penanganan covid-19. Kebijakan yang sedang kelurahan jalankan saat ini yaitu kebijakan Makassar Recover yang dikeluarkan oleh walikota No 5 Tahun 2021. Selain itu pihak puskesmas dalam melakukan proses

penanganan tetap berpedoman pada pencegahan dan pengendalian covid-19 revisi 2 tahun 2020.

b. Komunikasi

Komunikasi memiliki peranan penting dalam pelaksanaan kebijakan publik. Komunikasi bertujuan untuk meningkatkan koordinasi, berbagi segala bentuk informasi dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Komunikasi merupakan aktivitas yang mengakibatkan orang lain menginterpretasikan sesuatu tindakan ide atau gagasan. Dalam melaksanakan kebijakan penanganan covid-19 tentunya komunikasi memiliki peran penting untuk menyampaikan informasi mengenai segala bentuk peraturan dan tindakan yang harus dilakukan. Berikut adalah wawancara bersama kepala Lurah (Ibu Armi Maroa,SE,M.A.P) Tamamaung mengenai bentuk komunikasi yang dilakukan.

Kalau untuk komunikasi kami melakukan sosialisasi mengenai program-program pemerintah dari walikota juga segala bentuk proses yang kami jalankan kepada masyarakat, tapi karena saat ini bentuk kerumunan dilarang jadi kami menyampaikan melalui ketua RT/RW dan nantinya mereka akan meneruskan ke masyarakat, tetapi kami juga biasa turun ke tempat umum seperti di pasar memberikan himbauan langsung, i juga memasang baliho di tempat-tempat umum yang berkaitan dengan pencegahan terhadap covid-19. (Wawancara, Maroa,SE,M.A.P, 11 Juni 2021)

Lebih lanjut dijelaskan oleh ibu Lurah Army Maroa:

Bahwa mereka melakukan pengontrolan ketat dengan tiap minggu wajib menerima laporan dari RT/RT terkait perkembangan yang terjadi di masyarakat.

Komunikator pelayanan publik dalam memberikan informasi untuk masyarakat wajib berpedoman pada Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25/2009 yang menyebutkan bahwa pelaksana dalam penyelenggaraan pelayanan publik harus berperilaku tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat serta tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/atau kewenangan yang dimiliki. Berikut lebih lanjut dijelaskan oleh Kepala Seksi Pemerintahan Pengelolaan Jaringan dan Pemberdayaan Bapak Nasrullaah A. S.Sos.

Masalah covid-19 ini bukan suatu virus yang biasa-biasa saja yang hadir di tengah kita. kami betul-betul meberikan informasi yang memang dibutuhkan oleh masyarakat, kami turun ketempat-tempat umum seperti pasar, jalan raya juga untuk memberikan himbauan langsung tentang cara mencegah covid-19 ini. pemasangan baliho-baliho di berbagai tempat juga kami lakukan untuk bisa menyebarkan informasi kepada masyarakat. (Wawancara, Nasrullaah A. S.Sos, 11 Juni 2021)

Di lihat dari pernyataan informan diatas bahwa dalam memberikan infromasi pihak kelurahan melakukan penyampain melalui Ketua RT/RW dan RT/RW akan menyampaikan kepada masyarakat, penyampain secara langsung hanya dilakukan ketika pemerintah turun ke tempat-tempat umum seperti di pasar. Pemasangan baliho ditempat umum juga dilakukan dalam proses pemberian informasi

Puskesmas sebagai garda terdepan dalam memutus mata rantai penularan covid-19 karena berada di setiap kecematan dan memiliki konsep

wilayah. Dalam kondisi pandemi covid-19 ini puskesmas juga perlu untuk melakukan berbagai upaya dalam penanganan pencegahan dan pembatasan penularan infeksi. Salah satu faktor yang penting untuk dilakukan yaitu mengenai komunikasi dalam memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pencegahan terhadap virus ini. Berikut hasil wawancara bersama Bapak Hayiddin.Skm.

Ada beberapa cara yang kami lakukan dalam menginformasikan masyarakat mengenai covid-19 ini. Kami melakukan kerjasama dengan kemitraan diantaranya seperti gugus tugas tingkat RW atau relawan dari kelurahan, ormas, tokoh agama dan mitra potensial lainnya dalam memberi dan menerima informasi, juga membuat beberapa media promosi kesehatan yang berdasarkan kepada protokol yang ada seperti pencegahan di level individu, keluarga dan masyarakat, para kelompok rentan dan PA yang harus dilakukannya. Media-media itu kami sebarluaskan seperti melalui grup whatsapp atau secara langsung seperti poster, stiker, spandung, baliho, dll. (Wawancara, Hayiddin Skm, 14 Juni 2021)

Berdasarkan pernyataan informan di atas bahwa pihak puskesmas melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam memberi dan menerima informasi terkait covid-19. Membuat berbagai media promosi kesehatan yang berdasarkan kepada protokol kesehatan dan disebarluaskan di berbagai media baik jejaring sosial, secara langsung, serta pemasangan berbagai spanduk dan baliho.

Dari Pernyataan informan dapat disimpulkan bahwa pemerintah kelurahan bahwa memberikan sosialisasi kepada masyarakat dengan terlebih dahulu memberikan sosialisasi melalui pihak RT/RW kemudian diteruskan

kemasyarakat. Penyampaian langsung ketika pemerintah turun langsung ketempat-tempat umum serta menyebarkan berbagai media promosi kesehatan yang berdasarkan kepada protokol kesehatan.

c. Sumber Daya

Adanya pelaksanaan kebijakan harus didukung dengan ketersediaan berbagai sumber daya yang memadai baik itu manusia, sumber daya anggaran, sumber daya peralatan dan kewenangan agar suatu kebijakan dapat berjalan dengan baik, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber daya yang diperlukan, maka pelaksanaan kebijakan terkhususnya dalam penanganan covid-19 ini akan cenderung tidak dapat dilaksanakan secara efektif. Tanpa adanya dukungan sumberdaya, kebijakan hanya akan menjadi dokumen yang tidak diwujudkan untuk memberikan pemecahan masalah yang di kalangan masyarakat, atau upaya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Berikut hasil wawancara bersama Ibu Armi Maroa, SE,M.A.P selaku Kepala Lurah Tamamaung.

Untuk ketersediaan sumberdaya sendiri, kalau dikelurahan sendiri kami menyediakan tempat cuci tangan dan hansanitizer untuk masyarakat yang melakukan pelayanan di kantor, juga kami membangun seperti poskoh pada beberapa tempat di kelurahan ini dengan bekerjasama bersama satgas covid-19 dan juga TNI,Polri sebagai pihak keamanan yang nanti mereka akan melakukan penjagaan di posko-posko tersebut. juga sudah beberapa kali kami melakukan penyemprotan disinfektan, alat-alat penyemprotan itu kami bagikan lengkap di tiap RW, dan kami biasa turun ke tempat umum seperti di pasar Tamamaung dan pasar pagi untuk membagikan

masker dan handsanitizer kepada masyarakat.(Wawancara, Armi Maroa, SE,M.A.P, 11 Juni 2021)

Selain Fasilitas yang disiapkan yang telah dijelaskan diatas, lebih lanjut Ibu Armi Maroa menjelaskan lagi bahwa:

Karena dampak dari covid-19 ini sangat berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat, maka dengan mengikuti peraturan dari kementerian sosial pihak kelurahan juga memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan di kelurahan ini , dan ada juga pembagian sembako kepada masyarakat.

Berdasarkan dari pernyataan informan diatas bahwa pihak kelurahan menyiapkan berbagai fasilitas seperti tempat cuci tangan dan handsanitizer bukan hanya di tempat umum tetapi juga di kantor kelurahan. pembangunan poskoh-poskoh juga dilakukan dengan bekerjasama bersama Tim Satgas dan TNI/Polri sebagai pihak keamanan yang akan melakukan penjagaan di pendirian poskoh-poskoh tersebut. Tujuan dari pembangunan pembangunan poskoh tersebut ialah untuk mengkoordinasi, mengendalikan, memantau, mengevaluasi, dan mengeksekusi penanganan covid-19 di kelurahan. Penyemprotan disinfektan juga kerap dilakukan oleh pemerintah kelurahan. Kepala Lurah Tamamaung juga mengatakan bahwa karena dampak dari pandemi covid-19 ini sangat berpengaruh pada ekonomi sehingga kelurahan juga melakukan pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat yang kurang mampu.

Kepalah Badan Tata Usaha Puskesmas Tamamaung Bapak Hayiddin Skm, juga mengatakan bahwa

Ketersediaan sumberdaya manusia baik tenaga kesehatan/non kesehatan tetap pada jumlah yang ada, ada beberapa penambahan jika ada tenaga kesehatan yang terpapar covid-19 dan harus isolasi mandiri ataupun rawat inap di Rumah Sakit, metoda untuk penanggulangan covid-19 disini bergantung pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dikeluarkan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) baik dari penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) dan lain sebagainya. (Wawancara, Hayiddin Skm, 14 Juni 2021)

Dari pernyataan informan diatas menyatakan bahwa ketersediaan tenaga kesehatan ataupun non kesehatan tetap pada jumlah yang ada namun akan ada penambahan jika tenaga kesehatan atau non kesehatan ikut terpapar covid-19. Cara-cara penanggulangan covid-19 tetap bergantung pada SOP dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Jadi dapat disimpulkan bahwa pihak kelurahan menyiapkan beberapa fasilitas dalam pencegahan covid-19 baik itu di kantor kelurahan dan di tempat-tempat umum, pembangunan poskoh-poskoh bersama tim satgas sebagai bentuk upaya keamanan ditengan masyarakat, serta dari pihak kesehatan dalam hal ini puskesmas tetap menyiapkan tenaga kesehatan maupun non kesehatan pada jumlah yang ada, serta metoda dalam penanggulangan covid-19 bergantung pada Standar Operasional (SOP) dari Kementerian kesehatan.

d. Disposisi Atau Sikap Dari Pelaksana

Disposisi ialah watak serta karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan, seperti komitmen, disiplin, kejujuran, kecerdasan dan sikap demokratis. Apabila pelaksana kebijakan memiliki disposisi yang baik,

maka ia akan bisa menjalankan kebijakan dengan baik, sebaliknya apabila pelaksana kebijakan memiliki sikap atau cara pandang yang berbeda dengan maksud dan arah dari kebijakan, maka dimungkinkan proses pelaksanaan kebijakan tersebut tidak akan efektif dan efisien. Disposisi atau sikap dari para pelaksana akan memberikan dukungan atau hambatan terhadap pelaksanaan kebijakan tergantung dari kesesuaian masing-masing kompetensi dan sikap dari pelaksana. Oleh karena itu, pemilihan serta penetapan personalia pelaksana kebijakan dipersyaratkan individu yang mempunyai kompetensi serta dedikasi yang tepat pada kebijakan yang telah ditetapkan. Berikut wawancara bersama Kepala Lurah Tamamaung Ibu Armi Maroa.

Sejauh ini sikap yang kami ambil seperti teguran lisan kepada masyarakat jika ada yang tidak mematuhi peraturan yang ada. Kami tetap menjalankan proses kebijakan yang ada dengan mengedepankan rasa kekeluargaan, saling membantu dan bekerjasama dengan baik.
(Wawancara, Armi Maroa, SE,M.A.P, 11 Juni 2021)

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh Kepala Seksi Pemerintahan Pengelolaan Jaringan dan Pemberdayaan Bapak Nasrullaah A. S.Sos.

Kami pemerintah kelurahan tetap tegas memberi himbauan kepada masyarakat terkait penanganan covid-19, kalau ada yang tidak mematuhi kami tetap meberikan teguran lisan.(Wawancara, Nasrullaah A. S.Sos, 11 Juni 2020)

Berdasarkan dari pernyataan informan diatas bahwa dalam menjalankan kebijakan sikap yang diambil yaitu mengedepankan rasa kekeluargaan, saling membantu dan bekerjasama dengan baik antara pihak kelurahan dan masyarakat, Sikap tegas dari pemimpin tetap dilakukan demi keamanan masyarakat.

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Kebijakan publik biasanya bersifat *top down* yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan. Sikap mereka itu dipengaruhi oleh pandangannya terhadap suatu kebijakan dan cara melihat pengaruh kebijakan itu terhadap kepentingan-kepentingan organisasinya dan kepentingan-kepentingan pribadinya. Hadirnya pandemi covid-19 ini menjadikan puskesmas sebagai garda terdepan dalam memberi pengetahuan (pendalaman dan pemahaman), melihat bagaimana respon dari penerima dan juga intensitas terhadap kebijakan yang ada. Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Berikut wawancara dilakukan bersama Kepala Badan Tata Usaha Puskesmas Tamamaung Bapak Hayiddin Skm.

Mengedepankan komunikasi trapeutik baik terhadap masyarakat. setiap tindakan pelayanan yang kami lakukan didahulukan dengan memberikan edukasi kepada masyarakat. Masyarakat berhak menerima atau menolak tindakan yang kami lakukan tanpa ada unsur paksaan. (Wawancara, Hayiddin Skm, 14 Juni 2021)

Berdasarkan pernyataan dari informan di atas dapat dikatakan bahwa puskesmas selalu terlebih dahulu memberikan edukasi kepada masyarakat baik secara langsung ataupun melalui media-media lainnya dalam melakukan tindakan pelayanan. Masyarakat juga memiliki hak untuk menolak serta menerima setiap tindakan yang dilakukan tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun.

Jadi dapat disimpulkan bahwa bahwa dalam proses penanggulangan covid-19 pemerintah kelurahan terlebih dahulu memberi edukasi selama proses pelayanan baik secara langsung ataupun tidak langsung kepada masyarakat. Sikap saling membantu dan bekerjasama selalu dilakukan dan harus mengedepankan rasa kekeluargaan

2. Respon Masyarakat

Hal yang menunjang serta melatarbelakangi ukuran dari suatu respon ialah sikap, persepsi dan partisipasi. Dalam prosesnya respon diawali dengan sikap seseorang, karena sikap sendiri merupakan suatu kecenderungan atau kesedihan yang dimiliki seseorang untuk bertindak laku jika menghadapi suatu hal tertentu. Berkaitan dengan respon masyarakat dalam kebijakan penanggulangan covid-19, berikut adalah hasil wawancara yang dilakukan peneliti bersama masyarakat di Kelurahan Tamamaung.

a. Kognitif

Respon kognitif merupakan suatu respon yang berkaitan erat dengan pengetahuan keterampilan dan informasi seseorang mengenai sesuatu. Respon ini timbul apabila adanya suatu perubahan terhadap apa yang dipahami oleh masyarakat. Kehadiran Pandemi Covid-19 telah telah membawa perubahan baru dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat wajib mengikuti segala kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Makassar terkait pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang mendapat respon, baik respon positif ataupun negatif dari berbagai kalangan dimasyarakat. Berikut hasil wawancara bersama salah satu tokoh masyarakat yaitu Bapak Abdul Rajab.

Hadirnya covid-19 ini awalnya saya sendiri juga jadi takut apalagi bisa menyebabkan kematian, tetapi kalau kita punya kesadaran diri yang baik mengikuti peraturan dari pemerintah seperti mematuhi protokol kesehatan, disiplin diri tinggi saya rasa bisa, awal munculnya itu saya sempat panik karena yang saya nonton di TV usia tua lebih cepat terdampak tetapi keluarga bilang jangan panik. Selama covid-19 juga saya lebih banyak duduk dirumah dan jarang keluar. (Wawancara, Abdul Rajab, 17 Juni 2021)

Peneliti juga melakukan wawancara bersama saudara oktavianus sebagai warga dari Kelurahan Tamamaung:

Covid-19 ini merupakan virus baru yang memang banyak membuat saya pribadi takut, tapi setelah tau bagaimana pencegahan terhadap virus ini saya tetap mengikuti protokol kesehatan. (Wawancara, oktavianus, 17 Juli 2021)

Jalannya pelaksanaan kebijakan publik harus didukung dengan pemberian informasi yang baik kepada masyarakat sehingga masyarakat benar-benar memahami jalannya suatu kebijakan, memberikan pengetahuan terkait penanganan covid-19. Seperti penerapan kebijakan Makassar Recover yang telah di ungkapkan oleh Kepala Lurah Tamamaung sebagai suatu kebijakan baru yang akan diterapkan di Masyarakat. Untuk itu peneliti melakukan wawancara bersama masyarakat saudara Ajis sebagai pelaku usaha terkait pemahaman tentang kebijakan tersebut.

Saya kurang tahu tentang Makassar Recover, itu ji protokol kesehatan seperti menggunakan masker, menjaga jarak yang biasa saya lakukan. (Wawancara, Ajis, 17 Juni 2021)

Berdasarkan dari pernyataan informan diatas mengatakan bahwa hadirnya covid-19 cukup membuat sebagian masyarakat takut mengingat virus

ini bisa menyebabkan sakit hingga pada level yang serius yaitu kematian. Informan diatas juga mengatakan bahwa cara agar bisa terhindar dari pandemic ini yaitu dengan kesadaran diri yang tinggi dan juga tetap mematuhi pada kebijakan pemerintah yang ada dan juga masih kurangnya tingkat sosialisasi dari pemerintah terkait beberapa kebijakan baru sehingga membuat masyarakat belum sepenuhnya memahami.

b. Afektif

Respon afektif merupakan suatu respon yang berkaitan erat dengan emosi, sikap, dan menilai dari seseorang terhadap suatu hal. Tujuan dari respon afektif sendiri ialah mengacu pada penerimaan, pemberian respon/partisipatisi, penilaian atau penentuan sikap, dan pembentukan pola hidup. Hadirnya Pandemi covid-19 memberikan suatu tantangan baru dalam kehidupan masyarakat dimana setiap orang wajib beradaptasi dengan aturan-aturan baru sebagai proses pengendalian terhadap pandemi covid-19 ini. Selain mendapatkan pengetahuan, keterampilan dan juga informasi dari berbagai pihak masyarakat juga harus mempunyai sikap, emosi dan penilaian terhadap pandemic ini. Berikut wawancara yang dilakukan bersama saudara Ajis selaku sebagai penjual nasi kuning di Kelurahan Tamamaung.

Semenjak adanya corona cara saya melakukan kegiatan agak sedikit berbeda dari biasanya, sekarang saya berjualan harus dengan mengikuti protokol kesehatan seperti wajib menggunakan masker, saya juga menyiapkan tempat cuci tangan didepan biar orang yang datang membeli bisa mencuci tangan terlebih dahulu, pendapatan juga jadi berkurang semenjak hadirnya pandemi ini.(Wawancara, Ajis, 17 Juni 2021)

Terkait Pelaksana Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang terdapat dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 22 Tahun 2020 berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2020 tanggal 16 April 2020 peneliti juga melakukan wawancara bersama masyarakat di Kelurahan Tamamaung terhadap sikap dan penilaian yang diambil terhadap peraturan tersebut. Berikut Pernyataan dari Saudara Arfan.

Awalnya berjalan dengan baik, lorong-lorong semua ditutup orang asing dilarang masuk tapi makin kesini mulai berkurang ketertibannya seperti biasa saja. Rasa bosan juga ada apalagi penghasilan juga berkurang, bantuan dari pemerintah juga tidak seberapa kebutuhan sehari-hari masih kurang. (Wawancara, Arfan, 17 Juni 2021)

Terkait dengan Peraturan Walikota Makassar Nomor 31 Tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan protokol kesehatan, dimana segala kegiatan dilakukan dari rumah baik proses belajar mengajar, ibadah dan kegiatan diluar dibatasi dan wajib menerapkan 3 M yaitu (menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan). Berikut hasil wawancara bersama Ibu Fatima (Ibu Janda).

Saya mengikuti protokol kesehatan, saya kalau kepasar selalu pake masker, masuk rumah harus cuci tangan lagi. Kalau untuk penyemprotan disinfektan pernah ada sekali disini. Kalau ada yang buat acara harus minta izin dari kelurahan dan tetap memtuhi protokol kesehatan, kalau acara nikahan biasa 1-2 hari dibuka, kalau acara digedung tidak sampai 1 hari palingan 4-5 jam saja. (Wawancara, Fatima, 17 Juni 2021)

Berdasarkan dari pernyataan informan diatas bahwa aktivitas yang dilakukan sangat berbeda sebelum dan sesudah munculnya pandemic covid-19 dimana pendapatan jadi berkurang, masyarakat juga harus mematuhi protokol kesehatan seperti menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Awal pelaksanaan PSBB dilihat berjalan dengan baik namun tidak bertahan lama timbulnya rasa bosan dari masyarakat juga mulai berkurang ketertiban. Bantuan yang didapat dari pemerintah setempat dirasa masih kurang dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

c. Konatif

Respon konatif sendiri merupakan suatu respon yang berhubungan erat dengan perilaku nyata yang meliputi tindakan atau kebiasaan yang dilakukan. Respon konatif berkaitan dengan tindakan yang dilakukan terhadap sesuatu hal yang diterima. Pandemi covid-19 ini dibutuhkan tindakan nyata dan kesadaran dari setiap masyarakat terhadap kebijakan yang ada agar mampu bersama-sama memutus mata rantai penyebaran wabah covid-19 ini. Untuk mengetahui terkait tindakan nyata yang dilakukan, berikut pernyataan dari Bapak Abdul Rajab.

Selalu mengikuti peraturan yang ada. Pemerintah mewajibkan kita mengikuti protokol kesehatan ikuti saja, ini juga untuk kebaikan sendiri.(Wawancara, Abdul Rajab, 17 Juni 2021)

Lanjut juga dijelaskan oleh saudara Jhon Isa.

Semua sebenarnya kembali pada kesadaran diri masing-masing, karena banyak orang juga yang masih acuh tak acuh dengan hal ini saya pribadi mengikuti peraturan yang ada, dan sebagai masyarakat disini tentunya harus saling mengingatkan jika ada kenalan atau

keluarga kita yang tidak disiplin.(Wawancara, Jhon Isa, 17 Juni 2021)

Berdasarkan hasil dari pernyataan informan diatas bahwa terkait tindakan nyata masyarakat harus didukung dengan tingkat kesadaran diri dari masing-masing orang dalam penanganan pandemi covid-19 ini. Informan diatas mengatakan bahwa dia tetap mengikuti peraturan yang ada apalagi untuk kebaikan diri sendiri, dan sebagai warga yang baik harus juga memberi contoh kepada keluarga dan kenalan dalam mengikuti kebijakan yang ada.

D. Pembahasan Penelitian

Berdasarkan dengan hasil penelitian yang dikemukakan oleh peneliti di atas, maka berikut adalah pembahasan atau analisis dari hasil tersebut.

1. Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Dalam Menanggulangi Covid-19

a. Kewenangan/struktur birokrasi

Birokrasi merupakan suatu struktur dan sekumpulan aturan-aturan yang ditetapkan untuk dapat mengendalikan segala aktivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Birokrasi dimaksudkan sebagai suatu sistem yang otoritas yang telah ditetapkan secara rasional oleh berbagai macam peraturan untuk mengorganisir pekerjaan yang dilakukan oleh banyak orang. Birokrasi merupakan sarana dan alat dalam menjalankan kegiatan pemerintahan di era masyarakat yang semakin modern dan kompleks. Pelayanan pemerintah pada umumnya dicerminkan oleh kinerja birokrasi pemerintah.

Secara konsep menurut Blau (1963) birokrasi yaitu organisasi yang ditujukan untuk memaksimalkan efisiensi dalam administrasi, yang

menurut Sayre memiliki ciri-ciri: spesialisasi tugas-tugas, hierarki otoritas, badan perundang-undangan, sistem pelaporan, dan personel dengan keterampilan dan peranan khusus. Weber sendiri sebagai penggagas birokrasi memberikan ciri-ciri yang lebih rinci hingga disebut sebagai organisasi yang rasional (*ideal types*), tidak sekalipun dimaksudkan menciptakan bentuk inefisiensi di dalam organisasi pemerintahan negara

Sebagai pelaksana birokrasi harus mampu memberikan kinerja yang sangat efektif terhadap berlangsungnya roda pemerintahan. Tata kelola pemerintahan sangat diperlukan untuk sistem birokrasi yang mengutamakan keadilan dan kemakmuran rakyatnya, serta untuk mengetahui segala keluhan kesah yang dirasakan oleh masyarakat. Oleh sebab itu peran penting dari birokrasi merupakan sebuah sistem terpenting untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dalam pelaksanaan birokrasi harus mampu memberikan solusi dan jalan keluar dalam memecahkan sebuah masalah yang sedang dihadapi dalam suatu lingkungan tertentu sehingga masyarakat mampu merasakan bentuk dari sebuah perkembangan dan perubahan secara signifikan dengan adanya pelayanan publik yang diberikan pemerintah sebagai pelaksana.

Seperti yang peneliti peroleh dari hasil penelitian diatas bahwa dalam menanggulangi penyebaran covid-19 pihak kelurahan mengikuti aturan dari atas yaitu prosedur yang dikeluarkan oleh Walikota Makassar selanjutnya peneliti menemukan bahwa dalam memberikan pemahaman terkait aturan-aturan yang dikeluarkan kepada masyarakat pihak kelurahan

hanya melakukan sosialisasi kepada para ketua RT/RW dan kemudian pihak RT/RW yang akan menyampaikan kepada masyarakat. Hal ini dirasa kurang efisien mengingat masyarakat perlu mendapat sosialisasi yang baik sehingga kebijakan tersebut selain dapat terlaksana dengan baik juga mendapat dukungan serta respon cepat dari masyarakat dalam memahami suatu kebijakan hingga akhirnya mematuhi atau turut terlibat dalam melaksanakan kebijakan. Kurangnya Sosialisasi secara langsung kepada masyarakat berdampak pada lambatnya informasi dan pengetahuan yang diterima oleh masyarakat. Hal ini juga didukung dengan salah satu pernyataan dari informan yaitu masyarakat yang mengatakan salah satu kebijakan Makassar Recover seperti yang diungkapkan oleh ibu Armi Maroa belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat bahkan tidak mengerti maksud dari kebijakan tersebut.

Dalam menanggulangi covid-19 peran dari pihak puskesmas menjadi sangat penting sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Hayiddin Skm selaku sebagai Kepala Badan Tata Usaha Puskesmas Tamamaung bahwa dalam menjalankan tugas mengikuti arahan dari Dinas Kesehatan sebagai atasan serta dalam pencegahan covid-19 pihak puskesmas berpedoman pada pencegahan dan pengendalian covid-19 revisi 4 tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan (KEMENKES).

Berdasarkan dengan hasil dan juga pembahasan yang peneliti utarakan, maka kesimpulannya bahwa berkaitan dengan Kewenangan/struktur birokrasi dalam menanggulangi covid-19 pihak kelurahan Tamamaung masih kurangnya melakukan bentuk sosialisasi langsung kepada masyarakat terkait berbagai kebijakan yang akan dijalankan yang menyebabkan kurangnya pemahaman serta pengetahuan yang diperoleh oleh masyarakat dan perlunya kerjasama yang baik dari pihak puskesmas dan kelurahan dalam menanggulangi penyebarann covid-19.

b. Komunikasi

Komunikasi adalah hal yang sangat penting dalam menyampaikan sesuatu pada orang lain. Komunikasi ini menjadi jembatan atau penghubung yang menyatukan berbagai ide, pemikiran, gagasan, dan juga sebagai penghubung untuk pemecahan masalah bagi individu antar individu atau kelompok antar kelompok. Komunikasi menurut Cook & Hunsaker (2007), bertujuan untuk meningkatkan koordinasi, berbagai informasi dan pemuas kebutuhan sosial. dengan demikian komunikasi dapat mendukung pencapaian tujuan suatu organisasi apabila komunikasi dapat berjalan baik secara efektif dan efisien. Komunikasi menurut Agustino (2006), merupakan salah satu variabel yang penting yang dapat mempengaruhi suatu implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat

keputusan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan. informasi yang diketahui para pengambil keputusan yang hanya bisa didapat melalui komunikasi yang baik.

Seperti yang dikatakan dari hasil penelitian diatas bahwa bahwa terkait komunikasi yang dilakukan dalam penanggulangan covid-19 pemerintah kelurahan melakukan sosialisasi, juga turun langsung ketempat-tempat umum seperti pasar untuk memberikan himbauan langsung kepada masyarakat terkait cara pencegahan covid yang baik, juga pemasangan baliho ditempat umum, lebih lanjut dijelaskan bahwa setiap minggu pihak kelurahan selalu melakukan koordinasi dengan wajib menerima laporan dari RT/RW terkait perkembangan yang terjadi di masyarakat, hal yang sama juga diungkapkan oleh Kepala Badan Tata Usaha Puskesmas Tamamaung bahwa ada beberapa cara yang dilakukan diantara melakukan kerjasama seperti gugus tugas tingkat RW atau relawan dari kelurahan, ormas, tokoh agama. Membuat berbagai media promosi kesehatan yang berdasarkan pada protokol kesehatan seperti pencegahan dilevel individu, keluarga, masyarakat dan para kelompok rentan. Media-media tersebut disebarluaskan ada yang melalui media sosial dan secara langsung seperti poster, stiker, spanduk dan baliho. Langkah-langka tersebut dilakukan pemerintah kelurahan sebagai upaya penyampain kepada masyarakat terkait pencegahan terhadap covid-19. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Lurah Tamamaung sebagai cara terbaik ditengah situasi pandemi saat ini. Pemerintah berupaya menyebarkan pesan atau

informasi mengenai kebijakan hingga program-program kerja kepada masyarakat.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah kelurahan melakukan beberapa upaya dalam pencegahan covid-19 seperti koordinasi yang dilakukan tiap minggu kepada RT/RW terkait perkembangan dimasyarakat pengontrolan ditempat umum dan memberikan sosialisasi, pemerintah kelurahan juga memanfaatkan media online sebagai salah satu alat untuk menyebarkan luaskan informasi.

c. Sumberdaya

Pelaksanaan kebijakan harus ditunjang dengan ketersediaan sumberdaya (manusia,materi dan metoda). Pelaksanaan kebijakan publik harus dilakukan secara cermat, jelas, dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumberdaya yang diperlukan maka pelaksanaan kebijakan akan cenderung tidak dapat dilaksanakan secara efektif. Tanpa dukungan sumberdaya kebijakan hanya akan menjadi dokumen yang tidak diwujudkan untuk memberikan pemecahan masalah yang ada di masyarakat, atau upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pada kesempatan penelitian di Kantor Kelurahan Tamamaung Ibu Armi Maroa selaku Kepala Kelurahan Tamamaung menjelaskan dalam upaya penanganan covid-19 bahwa pihak kelurahan menyiapkan berbagai fasilitas seperti tempat cuci tangan dan handsanitizer bukan hanya di tempat umum tetapi juga di kantor kelurahan. pembangunan poskoh-poskoh juga dilakukan dengan bekerjasama bersama Tim Satgas dan

TNI/Polri sebagai pihak keamanan yang akan melakukan penjagaan di pendirian poskoth-poskoth tersebut. Tujuan dari pembangunan pembangunan poskoth sendiri ialah untuk mengkoordinasi, mengendalikan, memantau, mengevaluasi, dan mengeksekusi penanganan covid-19 di kelurahan. Jika dilihat dari sumberdaya manusia pihak kelurahan bekerjasama dengan tim Satgas juga TNI/Polri dalam melakukan pengawasan. Fungsi dari Satgas sendiri ialah: membentuk poskoth dan call center serta menginformasikan kepada masyarakat, memberikan informasi tentang pencegahan dan pengendalian serta penanganan penyebaran covid-19, melarang pelaksanaan kegiatan masyarakat yang bersifat mengumpulkan massa dan jumlah besar termasuk pelaksanaan kegiatan keagamaan dan sejenisnya. Pada masa pandemi saat ini kelurahan menjadi salah satu yang paling rentan terkena dampak yaitu berdampak pada gangguan perekonomian masyarakat. Sehingga urgensi penguatan masyarakat sangatlah penting untuk dilakukan pada kondisi saat ini. Oleh karena itu pemerintah juga mengeluarkan kebijakan melalui Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/HUK/2020 tentang "pelaksanaan bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai dalam penanganan dampak covid-19" maka pihak kelurahan juga melakukan pendataan kepada masyarakat yang memang benar-benar layak mendapatkan bantuan. Bantuan Sosial ini difokuskan kepada masyarakat yang kehilangan mata pencarian selama covid-19, penerima bantuan tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) lain dari pemerintah pusat.

Hasil wawancara bersama Kepala Badan Tata Usaha Puskesmas Tamamaung juga mengatakan bahwa ketersediaan sumberdaya manusia tetap pada jumlah yang ada dan metoda dalam penanggulangan covid-19 tetap pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Bisa dilihat bahwa pihak kelurahan tetap menyediakan fasilitas dalam menanggulangi covid-19 kepada masyarakat, kerjasama dengan pihak keamanan ikut membantu dalam proses pencegahan ini dan sumberdaya manusia dari pihak puskesmas tetap pada jumlah yang ada dan terjadi penambahan jika ada yang terdampak.

d. Disposisi atau sikap dari pelaksana

Menurut Edward III dalam (Winarno,2005) mengemukakan "kecenderungan-kecenderungan atau disposisi menjadi salah satu faktor yang memiliki konsekuensi penting bagi pelaksanaan kebijakan yang efektif". Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif dan adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar pelaksanaan kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Begitupun sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap suatu implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka pelaksanaan kebijakan akan menghadapi kendala yang serius. Seperti yang dijelaskan oleh Kepala Lurah Ibu Armi Maroa bahwa pemerintah tetap mengikuti kebijakan yang ada dengan mengedepankan rasa kekeluargaan, saling membantu dan bekerjasama

dengan baik untuk bisa bersama-sama menanggulangi penyebaran covid-19 ini. Terkait dengan sikap yang diambil oleh pihak pemerintah terhadap masyarakat yang tidak menjalankan cara-cara pencegahan covid-19 yang baik dan benar maka yang dilakukan yaitu dengan teguran lisan karena seperti yang dijelaskan oleh ibu Armi Maroa bahwa pencegahan virus ini sebenarnya kembali kepada kesadaran diri masing-masing orang karena hadirnya wabah ini ada sebagian yang percaya dan juga bersikap tidak percaya dan bahkan bersikap acuh tak acuh.

Seperti yang dijelaskan juga oleh Bapak Hayiddin Skm selaku sebagai kepala puskesma Tamamaung mengatakan bahwa mereka tetap mengedepankan komunikasi yang baik kepada masyarakat serta setiap pelayanan yang dilakukan didahulukan dengan pemberian edukasi. Masyarakat juga memiliki hak untuk menerima dan menolak tindakan yang dilakukan tanpa adanya unsur paksaan. Dapat dilihat bahwa pemerintah kelurahan dalam menjalankan kebijakan sikap kekeluargaan dan kerjasama yang baik perlu ditanamkan didalam suatu tatanan pemerintahan sehingga menghasilkan komunikasi dan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

2. Respon Masyarakat Terhadap Upaya penanggulangan Covid-19

a. Kognitif

Respon kognitif berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan informasi seseorang mengenai suatu hal. Berdasarkan dengan hasil penelitian yang diperoleh diatas bahwa, awal kemunculan covid-19 ini

masyarakat yang berada di usia rentan lebih takut terdampak. Sebagian pengetahuan terkait informasi wabah covid-19 didapat masyarakat dari media elektronik seperti tv, lanjut dijelaskan bahwa cara agar bisa terhindar dari pandemi ini yaitu dengan kesadaran diri yang tinggi dan juga tetap mematuhi pada kebijakan pemerintah yang ada.

Peneliti juga melihat masih lemahnya tingkat sosialisasi dimasyarakat yang membuat sebagian masyarakat masih belum memahami beberapa kebijakan baru yang dijalankan. Tingkat penyampaian informasi yang dilakukan oleh pihak kelurahan yaitu melalui pihak RT/RW dinilai kurang menjamin tercapainya pemerataan pemahaman bahkan sebagian masyarakat tidak mengetahui salah satu kebijakan baru seperti yang diungkapkan oleh Ibu Lurah yaitu akan dilaksanakannya Makassar Recover.

Sosialisasi dalam kebijakan publik merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang diberi kewenangan sebagaimana diatur dalam suatu kebijakan, aktor pada umumnya merupakan aparat pemerintah yang secara legal/formal memiliki kewenangan dan terikat dengan kebijakan yang telah dibuat, apakah itu pihak yang terlibat langsung dalam proses perumusan kebijakan, atau pihak yang sengaja ditunjuk oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan sosialisasi, atau juga pihak yang akan terlibat langsung dalam pelaksanaan kebijakan, sehingga pihak-pihak tersebut harus memastikan bahwa pihak lainnya beserta kelompok sasaran mengetahui isi atau substansi dari suatu kebijakan yang telah dibuat.

Kejelasan akan adanya informasi dalam proses sosialisasi akan menentukan tingkat pengetahuan dan pemahaman lebih dari pihak-pihak yang memang terlibat dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan yang dibuat, sehingga isi atau substansi kebijakan tersebut harus benar-benar jelas, rinci dan dapat dipahami dengan mudah.

b. Afektif

Respon dari afektif sendiri berkaitan dengan sikap, emosi dan penilaian dari seseorang terhadap suatu hal. Berdasarkan dengan hasil penelitian diatas bahwa terjadinya perubahan terhadap cara kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh salah satu penjual nasi kuning dia juga menjelaskan bahwa hadirnya pandemi ini menyebabkan pendapatan dalam berjualan nasi kuning pun jadi berkurang. Terkait sikap dan penilaian yang diambil selama diterapkannya kebijakan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang terdapat dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 22 Tahun 2020 berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2020 tanggal 16 April 2020, pernyataan dari salah satu informan diatas mengatakan bahwa awal dilaksanakannya PSBB berjalan dengan baik setiap lokasi ditutup dan warga asing dilarang masuk kedalam wilayah yang tutup, namun ketertiban tersebut tidak berjalan lama proses pengawasan pun mulai berkurang, juga muncul rasa bosan dari sebagian masyarakat atas beberapa kebijakan yang ada. Untuk pelaksanaan protokol kesehatan masyarakat menjalankan kewajiban seperti menggunakan masker juga

mencuci tangan dan jika ada pelaksanaan acara yang digelar oleh masyarakat harus melalui izin dari pihak kelurahan.

Berdasarkan pembahasan diatas peneliti melihat bahwa proses pengawasan terhadap jalannya suatu kebijakan dilihat masih kurang. Menurut Prayudi pengawasan ialah suatu proses untuk menetapkan yang sedang dijalankan, dilaksanakan atau diselenggarakan dengan apa yang ingin dikehendaki, direncanakan atau diperhatikan.

c. Konatif

Respon konatif ini berkaitan dengan respon yang berhubungan erat dengan perilaku nyata yang meliputi tindakan atau kebiasaan yang dilakukan. Respon ini berkaitan dengan tindakan yang dilakukan terhadap sesuatu hal yang diterima terkhususnya selama munculnya pandemi covid-19. Dilihat dari pernyataan bapak Abdul Rojab yang mengatakan tetap mengikuti aturan yang ada karena aturan yang diberlakukan juga untuk kepentingan bersama, sedangkan pernyataan dari saudara Jhon Isa yang masih melihat beberapa masyarakat yang masih acuh tak acuh terhadap pandemi covid-19 ini, namun saudara Jhon secara pribadi dengan kesadaran dari dalam diri tetap mengikuti aturan yang ada, serta saling mengingatkan kepada orang-orang terdekat. Dua informan diatas peneliti menilai bahwa memiliki sikap kesadaran diri yang baik dalam merespon jalannya aturan yang diberlakukan. Bapak Abdul Rojab merasa tidak keberatan terhadap protkol kesehatan karena tidak merugikan dirinya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari analisa dan pembahasan yang telah penulis lakukan diatas mengenai Upaya Pemerintah Dalam Menanggulangi Covid-19 Di Kelurahan Tamamaung Kota Makassar yaitu:

1. Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Dalam Menanggulangi Covid-19 di Kelurahan Tamamaung Kota Makassar yaitu, pemerintah kelurahan tetap menjalankan kebijakan berdasarkan prosedur yang ada. Namun masih kurangnya sosialisasi yang belum berjalan dengan maksimal diperlihatkan dengan beberapa masyarakat yang masih belum memahami beberapa kebijakan yang ada hal ini dikarenakan salah satu proses pemberian sosialisasi yang dilakukan melalui pihak RT/RW tidak menjamin bahwa seluruh masyarakat bisa menerima informasi yang ada.
2. Respon masyarakat terhadap upaya penanggulangan covid-19 di Kelurahan Tamamaung Kota Makassar yaitu, terjadi perubahan sikap masyarakat dalam bentuk respon kognitif, respon afektif, dan respon konatif (tindakan) sejak hadirnya wabah covid-19 di Kelurahan Tamamaung Kecamatan Panakukkang Kota Makassar. Aspek kognitif, berkaitan dengan tingkat pengetahuan dan kepercayaan masyarakat terkait dengan covid-19 dan dampak yang dibawanya bagi kehidupan. Aspek afektif, berkaitan dengan perasaan masyarakat, awalnya merasakan ketakutan/panik ketika munculnya wabah covid-19 setelah menerima edukasi dari pihak kelurahan

ataupun melalui media online, mau mendukung dan setuju atas kebijakan yang ada, dan berusaha menerima perubahan yang terjadi meskipun cukup sulit. Sedangkan aspek konatif, sebagai perluasan dari komponen kognitif dan komponen afektif. Dengan pengetahuan dan perasaan yang terdapat dalam dirinya, masyarakat mewujudkannya dengan bersikap membatasi diri, lebih waspada, berhati-hati, protektif, dan mawas diri.

B. Saran

1. Pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam penanggulangan covid-19 di Kelurahan Tamamaung perlu lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait kebijakan covid-19 secara merata dimasyarakat
2. Pemerintah Kelurahan Tamamaung agar sekiranya lebih memberikan sosialisasi langsung tentang kebijakan penanganan covid-19 kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustino Leo. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung.
- Anggara Sahya. 2014. *Pengantar Kebijakan Publik*. Cv Pustaka Setia: Bandung
- Fahmal A. Muin. 2008. *Peran Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih*. Kreasi Total Media: Jakarta Selatan
- Hamdi Muchlis. 2007. *Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep*. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Kencana, S.I (2007). *Memahami Ilmu Pemerintahan: suatu kajian, teori konsep*. Raja Grafindo Persada
- Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Rineka Cipta: Jakarta
- Kurniaan Luthfi J dan Mustafa Lutfi. 2017. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Serara Perss: Malang
- Budiarjo Miriam. 2009. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta
- Mukarom Zaenal dan Wijaya Laksana. 2015. *Manajemen Pelayanan Publik*. Cv Pustaka Setia: Bandung.
- Nazir Moh. 2009. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia: Bogor.
- Ndraha. (2005) *Teori Budaya Organisasi*. Cetakan Pertama, PT. Rineka Cipta
- Nurdin Ismail. 2019. *Kualitas Pelayanan Publik*. Media Sahabat Cendekia: Surabaya
- Poerdawadaminta. (1986). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka: Bandung
- Rahmat Jalaludin. 2007. *Psikologi Komunikasi*. Remaja Rosda Persada: Bandung
- Soekanto Soerjono. 2005. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta, cv: Bandung.
- Syafiie Inu Kencana. 2007. *Ilmu Pemerintah*. Mandar Maju: Bandung

Winamo Budi. 2008. *Teori & Proses Kebijakan Publik*. MedPress: Yogyakarta

Jurnal

Agustino Leo, 2020. Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19:

Ilham Arief Sirajuddin. Diakses dari journal.uinjkt.ac.id pada tanggal 12 desember 2020.

Muadi Sholih., dkk. 2016. Konsep Dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik. Diakses dari jurnalfuf.uinsby.ac.id pada tanggal 8 november 2020.

Pengalaman Indonesia. Diakses dari samarinda.lan.go.id pada tanggal 29 oktober 2020

Ristyawati Aprista, 2020. Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Covid-19 Oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD 1945. Diakses dari ejournal2.undip.ac.id pada tanggal 12 desember 2020.

Sirajuddin, Ilham Arief, 2016. Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik Dasar Bidang Sosial Di Kota Makassar. Diakses dari jurnal.unigal.id pada tanggal 31 oktober 2020

Thorik, Sylvia Hasanah, 2020. Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Indonesia Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19.

Internet

<https://health.grid.id/read/352101448/update-covid-19-pemkot-makassar-terapkan-psbk-di-4-kecamatan-ada-105-kasus?page=all> (diakses pada 7 november 2020).

<https://news.detik.com/berita/d-5074132/positif-corona-di-makassar-tembus-3028-terbanyak-di-panakkukang> (diakses pada 7 nov 2020).

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/06/210000269/kebijakan-publik--pengertian-tujuan-dan-ciri-ciri?page=all> (diakses pada 8 nov 2020).





LAMPIRAN - LAMPIRAN

Lampiran 1 Matris Pengembangan Instrumen

I. Judul Penelitian:

Upaya Pemerintah Dalam Menanggulangi Covid-19 Di Kelurahan Tamamaung Kota Makassar

II. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam menanggulangi covid-19 di Kelurahan Tamamaung Kota Makassar?
2. Bagaimana respon masyarakat terhadap upaya penanggulangan covid-19 di Kelurahan Tamamaung Kota Makassar?

III. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam menanggulangi covid-19 di Kelurahan Tamamaung Kota Makassar
2. Untuk mengetahui seperti apa respon masyarakat dalam upaya menanggulangi covid-19 di Kelurahan Tamamaung Kota Makassar

IV. Fokus Penelitian

1. Pelaksanaan kebijakan pemerintah
2. Respon Masyarakat

V. Informan Penelitian

1. Pemerintah :
 - a. Kepala Kelurahan Tamamaung = 1 orang
 - b. Kepala Badan Tata Usaha Puskesmas Tamamaung = 1 orang
 - c. Kepala Seksi Pengelolaan Jaringan & Pemberdayaan = 1 orang

2. Masyarakat

- a. Tokoh masyarakat = 1 orang
- b. Pelaku Usaha = 2 orang
- c. Karyawan kantor = 1 orang
- d. masyarakat biasa = 1 orang

**TABEL MATRIX UNTUK PENGEMBANGAN INSTRUMEN
PENELITIAN**

No	Rumusan Masalah	Fokus Penelitian	Indikator	Sumber Informan	Teknik Pengumpulan Data
1.	Bagaimana pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam menanggulangi covid-19 di Kelurahan Tamamaung Kota Makassar.	Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah dalam menanggulangi covid-19	a. Kewenangan/struktur birokrasi b. Komunikasi c. Sumberdaya d. Disposisi/sikap pelaksana	1. Kepala Lurah 2. Kepala Seksi 3. Kepala Badan Tata Usaha Puskesmas Tamamaung	- observasi - wawancara - dokumen
2.	Bagaimana respon masyarakat terhadap upaya penanggulangan covid-19	Respon masyarakat terhadap upaya penanggulang covid-19	a. Kognitif b. Afektif c. Konatif	Masyarakat	- observasi - wawancara - dokumen

Lampiran 2 Pedoman wawancara

Upaya Pemerintah Dalam Menanggulangi Covid-19 Di Kelurahan

Tamamaung Kota Makassar

I. Pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam menanggulangi covid-19 di Kelurahan

Tamamaung Kota Makassar.

a. Kewenangan/struktur birokrasi

1. Seperti apa kewenangan yang dilakukan pemerintah kelurahan dalam menanggulangi covid-19?

b. Komunikasi

1. Bagaimana komunikasi yang dilakukan pihak kelurahan dalam menanggulangi covid-19?

c. Sumberdaya

1. Seperti apa sumberdaya yang disiapkan oleh pemerintah kelurahan dalam menanggulangi covid-19?

d. Disposisi/sikap pelaksana

1. Bagaimana sikap yang diambil dari pihak pemerintah selama proses penanggulangan covid-19?

II. Respon masyarakat terhadap upaya penanggulangan covid-19 di Kelurahan

Tamamaung Kota Makassar.

a. Kognitif

1. Apa yang anda ketahui terkait covid-19?

b. Afektif

1. Bagaimana sikap yang anda ambil terhadap upaya pencegahan covid-19 yang dilakukan oleh pemerintah?

c. Konatif

1. Bagaimana tindakan yang anda lakukan sehari-hari selama covid-19?



Lampiran 3 Pedoman Observasi

Judul Penelitian

UPAYA PEMERINTAH DALAM MENANGGULAGI COVID-19 DI KELURAHAN TAMAMAUNG KOTA MAKASSAR

I. Obeservasi Umum Lokasi Penelitian

- a. Profil Kelurahan Tamamaung
- b. Visi dan Misi Kelurahan Tamamaung
- c. Lokasi dan letak geografis wilayah
- d. struktur organisasi

II. Pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam menanggulangi covid-19 di

Kelurahan Tamamaung Kota Makassar

- a. Kewenangan/struktur birokrasi
- b. Komunikasi
- c. Sumberdaya
- d. Disposisi/sikap pelaksana

Lampiran 4 Daftar Informan Penelitian

Judul Penelitian

UPAYA PEMERINTAH DALAM MENANGGULANGI COVID-19 DI KELURAHAN TAMAMAUNG KOTA MAKASSAR

Data Informan Penelitian

No.	Nama Informan	Jabatan Informan
1.	Armi Maroa, SE,M.A.P	Kepala Luraha Tamamaung
2.	Nasrullaah A. S.Sos	Kasi Pengelolaan Jaringan dan Pemberdayaan
3.	Bapak Hayiddin,Skm	Kepala Badan Tata Usaha Puskesmas Tamamaung
4.	Abdul Rajab	Tokoh Masyarakat
5.	Ajis	Pelaku usaha
6.	Ibu Fatima	Pelaku Usaha
7.	Jhon Isa	Pelajar
8.	Arfan	Karyawan

Lampiran 5 Surat Keterangan Penelitian

Surat Izin Penelitian DPMPTSP Provinsi Sulawesi Selatan




1 2 0 2 1 1 9 3 0 0 5 7 3 5

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 15314/S.01/PTSP/2021
Lampiran : -
Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Walikota Makassar

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan FISIP Univ. Bosowa Makassar Nomor : A.138/FSP/UNIBOS/V/2021 tanggal 27 Mei 2021 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **SESILIA CLAUDYA GLADIS KELEN**
Nomor Pokok : 4517021059
Program Studi : Ilmu Adm. Negara
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. Urip Sumoharjo Km. 04, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

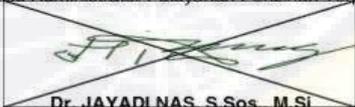
" UPAYA PEMERINTAH DALAM MENANGGULANGI COVID-19 DI KELURAHAN TAMAMAUNG KOTA MAKASSAR "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **10 Juni s/d 10 Juli 2020**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dan Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan **barcode**.
Demikian surat izin penelitian ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 02 Juni 2021

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



Dr. JAYADI NAS, S.Sos., M.Si
Pangkat : Pembina Tk.I
Nip : 19710501 199803 1 004

Tembusan Yth
1. Dekan FISIP Univ. Bosowa Makassar di Makassar;
2. Pertinggal.

SIMAP PTSP 02-06-2021



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231



Surat Izin Penelitian
Kecamatan Panakkukang



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Ahmad Yani No 2 Makassar 90111
Telp +62411 – 3615867 Fax +62411 – 3615867
Email : Kesbang@makassar.go.id Home page : <http://www.makassar.go.id>

Makassar, 03 Juni 2021

K e p a d a

Yth. CAMAT PANAKKUKANG
KOTA MAKASSAR

D i -
MAKASSAR

Nomor : 070 / 946 -II/BKBP/VI/2021
Sifat :
Perihal : Izin Penelitian

Dengan Hormat,

Menunjuk Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 15314/S.01/PTSP/2021, Tanggal 02 Juni 2021. Perihal tersebut di atas, maka bersama ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa:

Nama : SESILIA CLAUDYA GLADIS KELEN
NIM / Jurusan : 4517021059 / Ilmu Adm. Negara
Pekerjaan : Mahasiswa (S1) Univ. Bosowa
Alamat : Jl. Urip Sumoharjo Km. 04, Makassar
Judul : "UPAYA PEMERINTAH DALAM MENAGGULANGI COVID-19 DI KELURAHAN TAMAMAUNG KOTA MAKASSAR"

Bermaksud mengadakan *Penelitian* pada Instansi / Wilayah Bapak/Ibu, dalam rangka *Penyusunan Skripsi* sesuai dengan judul di atas, yang akan dilaksanakan mulai tanggal **10 Juni s/d 10 Juli 2021**.

Demikian disampaikan kepada Bapak untuk dimaklumi dan selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Walikota Makassar Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Drs. AKHMAD NAMSUM, MM
Pangkat : Pembina
NIP : 19670524 200604 1 004

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prop. Sul – Sel. di Makassar;
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis P2T Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prov. Sul Sel di Makassar;
3. Dekan FISIP Univ. Bosowa Makassar di Makassar;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;
5. Arsip

Surat Izin Penelitian
Kelurahan Tamamaung



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
KECAMATAN PANAKKUKANG**

Jl. Batu Raya 168, Telp 456054 Makassar

Kode Wilayah : 73.71.09

Makassar, 03 Juni 2021

Nomor : 070/ 30/KPNK/VI/2021
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. Lurah Tamamaung
Di-
Tempat

Menunjuk surat dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Nomor : 070/946-11/BKBP/VI/2021, Tanggal 03 Juni 2021. Perihal tersebut di atas maka bersama ini di sampaikan kepada saudara bahwa :

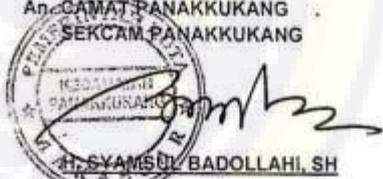
Nama	: SESILIA CLAUDYA GLADIS KELEN
Nim/Jurusan	: 4517021059 / Ilmu Adm. Negara
Pekerjaan	: Mahasiswa (S1) Univ. Bosowa
Alamat	: Jl. Urip Sumoharjo Km. 04 Makassar
Judul	: " UPAYA PEMERINTAH DALAM MENANGANI COVID-19 DI KELURAHAN TAMAMAUNG KOTA MAKASSAR "

Bermaksud mengadakan *Penelitian* pada Instansi/Wilayah Bapak, sesuai dengan judul di atas, yang akan dilaksanakan mulai tanggal 10 Juni s/d 10 Juli 2021.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada prinsipnya kami dapat menyetujui dengan memberikan surat rekomendasi izin Penelitian ini.

Demikian disampaikan kepada Bapak untuk dimaklumi dan selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Walikota Makassar Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

An. KAMAT PANAKKUKANG
SEKCAM PANAKKUKANG



H. SYAMSUL BADOLLAHI, SH
Pangreh. Penata TK I
Nip.19690810 199103 1 015

Tembusan:

1. Lurah Pandang
2. Arsip

Surat Keterangan Selesai Penelitian


PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
KECAMATAN PANAKKUKANG
KELURAHAN TAMAMAUNG


Jalan Abdullah Dg. Sirua Lr. 3 No. 10, Telp. (0411) 455273 Makassar

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : 070 / 87 / KTM / VII / 2021

Yang bertanda tangan dibawah ini, Lurah Tamamaung Kecamatan Panakkukang Kota Makassar menerangkan bahwa :

Nama : SESILIA CLAUDYA GLADIS KELEN
 Nim/Jurusan : 4517021059/Illmu Adm. Negara
 Pekerjaan : Mahasiswi (S1)/Univ. Bosowa
 Judul : "Upaya Pemerintah Dalam Menanggulangi Covid – 19 di
 Kelurahan Tamamaung Kota Makassar"

Benar yang bersangkutan telah melakukan Penelitian di Wilayah Kelurahan Tamamaung Kecamatan Panakkukang kota Makassar. Terhitung mulai tanggal 10 Juni s/d 10 Juli 2021

Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Makassar, 15 Juli 2021


Arne Maroa, SE. M. A. P
 Pangkat : Penata
 Nip. 19760404 200902 2 002

Lampiran 6 Dokumentasi Penelitian



Kantor Kelurahan Tamamaung



Puskesmas Tamamaung



Bersama Kepala Lurah Tamamaung



Bersama Kepala Badan Tata Usaha
Puskesmas Tamamaung



Bersama Ibu Fatima & Saudara Arfan



Bersama Kakek Abdul Rajab



Bersama Saudara Jhon Isa



Saudara Ajis

BOSOWA

